

**PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN POHUWATO
(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah)**

OLEH:

**SITI WINDA PURNAMA LAIMA
E.11.18.089**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar sarjana



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHuwATO

(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah)

OLEH :
SITI WINDA PURNAMA LAIMA
E.11.18.089

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu Syarat ujian guna memperoleh Gelar sarjana
dan telah di setujui oleh tim pembimbing Pada tanggal
Gorontalo, 27 Mei 2022

Pembimbing I



Dr. Arifin, SE.,M.Si
NIDN. 0907077401

Pembimbing II



Marina Paramitha S.Piola,SE.,M.Ak
NIDN. 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHuwATO (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah)

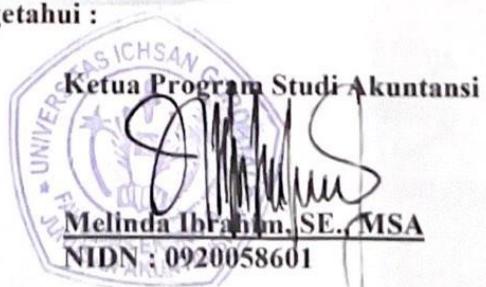
OLEH :

SITI WINDA PURNAMA LAIMA
E.11.18.089

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Starata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Bala Bakri SE.,S.Psi.,S.ip.,M.Si
(Ketua Penguji)
2. Reyther Biki SE., M.Si
(Anggota Penguji)
3. Rahma Rizal SE., Ak., M.Si
(Anggota Penguji)
4. Dr. Arifin SE., M.Si
(Pembimbing Utama)
5. Marina Paramitha S.Piola SE., M.Ak
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui :



PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantum sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan susunnya dan apabila di kemudian hari terdapat penimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 20 April 2022
Yang Membuat Pernyataan



Siti Winda Purnama Laim.
E.11.18.089

ABSTRACT

SITI WINDA PURNAMA LAIMA. E1118089. FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT OF POHuwATO REGENCY REGIONAL GOVERNMENT (A CASE STUDY AT REGIONAL FINANCIAL AGENCY)

This study aims to measure the financial performance of the Regional Government of Pohuwato Regency by using measurements of the effectiveness ratio, efficiency ratio, independence ratio, and growth ratio. The type of research carried out is in the form of qualitative descriptive. The data employed in this study is secondary data of financial statements of the Pohuwato Regency Government for 2017 – 2020 obtained by using documentation techniques. The data measurement method applies the financial ratio formula. The results of this study indicate that the financial performance of the Pohuwato Regency Government is still not optimal. Even though the local revenue management is classified as effective and efficient, the growth level is still relatively low. Moreover, the level of independence is still relatively low. It can be proven from the amount of Central Government assistance compared to Pohuwato Regency's Local Own-Source Revenue.

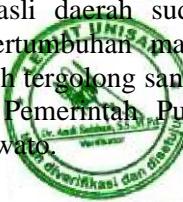
Keywords: ratio, effectiveness, efficiency, independence, growth

ABSTRAK

SITI WINDA PURNAMA LAIMA. E1118089. PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH)

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan pengukuran rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah berbentuk deskritif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato 2017 – 2020 yang di peroleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Metode pengukuran data menggunakan rumus rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah tergolong efektif dan efisien, akan tetapi untuk tingkat pertumbuhan masih tergolong rendah. Terlebih lagi untuk tingkat kemandirian masih tergolong sangat rendah. Hal ini dapat di buktikan dari besarnya bantuan Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: rasio, efektivitas, efisiensi, kemandirian, pertumbuhan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki dirimu
(ALI BIN ABI THALIB)

“Perbanyak bersyukur, kurangi menegeluh. Buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap moment dalam hidup, berpetualanglah.”

(Ayu Estiningtyas)

(SITI WINDA PURNAMA LAIMA)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya: “kapan Skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahanan, bukan juga sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik baiknya skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPATKU MENIMBA ILMU
2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, serta salam dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan yang mengantar kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato”**. Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini. mohon maaf sebesar-besarnya karena sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. berkat limpahan dan kasih sayang Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan berbagai pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.Abd Gaffar La Tjokke, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas

Ichsan Gorontalo. Bapak Dr.Musafir,SE., M.Si, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Pembimbing I Bapak Dr. Arifin SE.,M.Si yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama mengerjakan penelitian ini, Ibu Marina Paramitha S.Piola, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II dan telah banyak membantu penulis serta mengarahkan selama mengerjakan penelitian ini, Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi yang telah membimbing penulis selama ini.

Serta Secara Khusus Penulis Menyampaikan Ucapan terima Kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua Tercinta Ibunda Yulan Rahim Ibrahim dan Ayahanda Aliran Laima yang telah mencerahkan segenap kasih sayang, Tenaga, Pikiran dan yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Kepada keluarga tercintah yang selalu mensupport, serta teman-teman Reguler Akuntansi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dorongan agar cepat-cepat menyelesaikan penelitian ini . Semoga segala doa dan bantuan akan bernilai ibadah disisi-nya dan selalu diridhoi oleh Allah SWT.

Billahitaufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Gorontalo, Oktober 2022

Siti Winda P. Laima
E.11.18.089

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Maksud dan tujuan penelitian	8
1.5.1 Maksud penelitian	8
1.5.2 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
2.1 Kajian teori	9
2.1.1 Teori Akuntabilitas Publik	9
2.1.2 Jenis jenis Akuntabilitas.....	10
2.1.3 Dimensi Akuntabilitas.....	11
2.1.4 Tipe-Tipe Akuntabilitas Publik.....	12
2.1.5 Akuntansi Sektor Publik	13

2.1.6	Tujuan Akuntansi Sektor Publik	14
2.1.7	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.1.8	Definisi Keuangan Pemerintah Daerah	15
2.1.9	Definisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
2.1.10	Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.....	17
2.1.11	Tujuan pengukuran kinerja	17
2.1.12	Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19
2.1.13	Manfaat Pengukuran Kinerja	20
2.1.14	Keterbatasan Pelaporan Pengukuran Kinerja.....	22
2.1.15	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.1.16	Tujuan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pemerintah Daerah	25
2.1.17	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.1.18	Teknik Analisis Kinerja Keuangan	29
2.1.19	Analisis Rasio Keuangan Daerah.....	30
2.1.20	Pengukuran Rasio Keuangan Daerah	32
2.2	Penelitian Terdahulu	35
2.3	Kerangka Pemikiran	37
BAB III.....	39	
OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	39	
3.1	Objek Penelitian.....	39
3.2	Metode Penelitian	39
3.3	Metode penelitian yang di gunakan	40
3.4	Oprasional Variabel	41
3.5	Jenis Data Dan Sumber Data	42
3.6	Jenis Data.....	42
3.7	Sumber Data	43
3.8	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.9	Teknik Analisis data	44
BAB IV	46	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46	
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	46

4.1.1	Tempat Penelitian.....	46
4.1.2	Sejarah Terbentuknya BKD Kabupaten Pohuwato	46
4.1.3	Visi Dan Misi	50
4.1.4	Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah	50
4.2	Hasil Penelitian	51
4.2.1	Rasio Efektifitas	51
4.2.2	Rasio Efisiensi.....	53
4.2.3	Rasio Kemandirian.....	55
4.2.4	Rasio Pertumbuhan	57
4.3	Pembahasan	59
4.3.1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dilihat Dari Rasio Efektivitas	59
4.3.2	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dilihat Dari Rasio Efisiensi	63
4.3.3	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dilihat Dari Rasio Kemandirian	66
4.3.4	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dilihat Dari Rasio Pertumbuhan	72
BAB V	74
KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	74
5.3	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran.....	4
Tabel 2. 1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	33
Tabel 2. 2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	33
Tabel 2. 3 Kriteria Kemandirian	34
Tabel 2. 4 Kriteria rasio pertumbuhan	35
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	42
Tabel 4. 1 terget dan realisasi PAD kabupaten pohuwato.....	51
Tabel 4. 2 Kriteria Rasio Efektivitas.....	52
Tabel 4. 3 Efektivitas Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020	53
Tabel 4. 4 biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD dan Realisasi penerimaan PAD	53
Tabel 4. 5 Kriteria Rasio Efisiensi	54
Tabel 4. 6 Efisiensi Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020	54
Tabel 4. 7 data pendapatan asli daerah, bantuan pemerintah pusat, dan pinjaman.....	55
Tabel 4. 8 Kriteria Rasio Kemandirian	56
Tabel 4. 9 Kriteria Kemandirian Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 – 2020.....	56
Tabel 4. 10 Data Total Pendapatan Asli Daerah	57
Tabel 4. 11 kriteria Rasio Pertumbuhan.....	58
Tabel 4. 12 Kriteria Pertumbuhan Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 KERANGKA PEMIKIRAN	38
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Dokumentasi.....	788
LAMPIRAN 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	82
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Izin Penelitian.....	83
LAMPIRAN 4 Laporan Realisasi Anggaran 2017.....	85
LAMPIRAN 5 Laporan Realisasi Anggaran 2018.....	87
LAMPIRAN 6 Laporan Realisasi Anggaran 2019.....	89
LAMPIRAN 7 Laporan Realisasi Anggaran 2020.....	91
LAMPIRAN 8 Hasil Turnitin.....	96
LAMPIRAN 9 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	97
LAMPIRAN 10 Curriculum Vitae.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah suatu Negara sangat mengharapkan sistem pemerintahan yang baik. Salah satunya yaitu dengan proses peningkatan pembangunan Daerah yang harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi serta pertanggungjawaban agar supaya lebih bisa meningkatkan perannya. Serta masyarakatpun dapat membangun dan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi di Daerah tersebut agar bisa menjadi suatu Daerah Otonom.

Menurut (Kaho, 2001:33) Otonomi Daerah secara sederhana sebagai sebuah bentuk “*selfrule*” atau “*selfgoverment*”. Dimana Kaho mengartikan berotonomi atau otonom adalah mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak/kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturan sendiri yang meliputi peraturan atau perundang undangan sendiri. pelaksanaan sendiri tentunya dalam batas batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri.

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia sudah di selenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Dimana praktik Otonomi Daerah di Indonesia mulai diberlakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dilakukan revisi atau perubahan sehingga bergeser ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga yang terakhir Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Daerah di Indonesia. Indonesia pada saat ini di hadapkan

dengan banyak tantangan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan tidak sentralistik serta otoritarian dan terkonsep dalam Otonomi Daerah. dimana salah satu daerah diberikan kewenangan dan sumber keuangan baru demi mendorong proses pembangunan di daerah masing masing yang nantinya akan mendorong proses pembangunan nasional. (Kiki Endah, 2016:797)

(Suparmoko, 2002:16) mengatakan bahwa otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah.

Dalam hal ini demi mewujudkan suatu daerah yang perekonomiannya baik maka proses Pengelolaan Keuangan Daerah tentunya menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Keuangan Daerah menurut (Yuwono, 2008:42) adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat di nilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Menurut (Ratmono & Solihin, 2017:6) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

Di adakannya pembaharuan Pengelolaan Keuangan Daerah atas dasar tuntutan terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan pembaharuan kelembagaan dan pembaharuan manajemen sektor publik. “Reformasi manajemen sektor publik harus dan sangat

ditentukan oleh Reformasi dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah” (Mardiasmo, 2002).

Maksud adanya otonomi Daerah dan Daerah otonom yang berdasarkan asas desentralisasi telah memberikan dampak positif bagi Daerah. Salah satu dampak positif dari otonomi Daerah adalah adanya pemekaran Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang hampir terjadi diseluruh Indonesia. Salah satu Daerah hasil dari pemekaran Wilayah adalah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Dampak dari pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota telah banyak terbentuk Kecamatan dan Kelurahan/Desa definitif yang baru. Tujuannya adalah pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dapat lebih Efektif dan Efisien, serta diharapkan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu disamping melakukan pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia, Pemerintah juga harus mengutamakan pemerataan pembangunan hingga ke Daerah Kabupaten Pohuwato yang masih tergolong Kabupaten berkembang. Sehingga untuk menganalisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola Keuangan Daerahnya adalah dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai Kemandirian Keuangan Daerah, Mengukur Efektifitas Dan Efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Yang diharapkan agar Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun cara Pengelolaan tersebut bisa berjalan dengan baik maka salah satunya dengan memperhatikan anggaran PAD.

Berikut ini gambaran PAD Kabupaten Pohuwato:

Tabel 1. 1 Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran

URAIAN	ANGGARAN			
	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	Rp.834.555.268.718	Rp.924.940.297.080,40	Rp.996.284.671.188,00	Rp. 989.132.017.642,40
PAD	Rp.70.687.310.318,00	Rp. 60.636.332.336,00	Rp. 66.564.152.234,00	Rp.74.201.375.007,00
PENDAPATAN TRANSFER	Rp.759.843.310.318,00	Rp. 839.032.271.000,00	Rp. 902.601.434.104,00	Rp.880.341.494.400,00
Pendapatan Transfer pusat	Rp. 652.636.066.000,00	Rp.711.185.231.000,00	Rp.758.384.805.900,00	Rp.730.575.882.000,00
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 4.024.371.400,00	Rp. 25.271.693.774,00	Rp. 27.119.084.850,00	Rp. 34.589.148.235,40
BELANJA	Rp.748.554.306.367,00	Rp.808.702.870.684,84	Rp.865.037.328.039,00	Rp.855.941.060.021,35
Belanja Operasi	Rp. 586.886.867.477,00	Rp. 625.329.568.629,92	Rp. 665.480.989.757,00	Rp. 653.015.295.841,09
Belanja Modal	Rp. 160.867.438.890,00	Rp.182.523.302.054,92	Rp. 199.116.338.282,00	Rp. 186.159.904.880,26

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.

URAIAN	REALISASI			
	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	Rp.822.135.259.819,85	Rp.904.691.929.792,04	Rp.970.534.277.246,48	Rp.955.946.119.926,20
PAD	Rp.69.387.597.124,85	Rp. 52.151.698.921,04	Rp. 62.337.943.760,48	Rp.50.953.585.078,20
PENDAPATAN TRANSFER	Rp.749.382.289.995,00	Rp. 828.345.870.871,00	Rp.880.890.770.953,00	Rp.873.954.776.371,00
Pendapatan Transfer pusat	Rp.641.292.929.981,00	Rp.702.676.142.423,00	Rp.740.354.936.381,00	Rp.723.282.363.424,00
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 3.365.372.700,00	Rp. 24.194.360.000,00	Rp.27.305.562.533,00	Rp. 31.037.768.447,00
BELANJA	Rp.700.558.710.677,84	Rp.758.514.064.354,45	Rp.827.465.026.349,56	Rp.812.324.184.587,00
Belanja Operasi	Rp. 548.275.121.561,84	Rp. 589.518.318.632,45	Rp.638.160.941.589,19	Rp. 621.662.367.893,00
Belanja Modal	Rp.152.860.739.116,00	Rp.168.925.745.722,00	Rp. 188.879.484.760,37	Rp. 174.904.529.862,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan ikhtisar data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato untuk pos PAD dan Belanja selama empat tahun terakhir dari 2017-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah PAD berdasarkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.70.687.310.318,00 miliar, yang terealisasi sebesar Rp. 69.387.597.124,85 miliar. Jadi presentase jumlah PAD pada tahun 2017 sebesar 98,16 %. Kemudian pada tahun 2018 anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 60.636.332.336,00 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp. 52.151.698.921,04 miliar. Jadi presentase jumlah PAD pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup besar yakni sebesar 86,01 %. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 66.564.152.234,00 miliar. Dan

yang terealisasi sebesar Rp. 62.337.943.760,48 miliar. Jadi presentase dari jumlah PAD pada tahun 2019 adalah 93,65 %. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan dengan jumlah PAD yaitu Rp.74.201.375.007,00 miliar. Dan yang terealisasi hanya sebesar 50.953.585.078,00 miliar. Sehingga presentase PAD di tahun 2020 adalah 68,67 %.

Untuk anggaran belajanya Pada tahun 2017 sebesar Rp. 748.554.306.367,00 miliar, yang diserap sebesar Rp.701.558.710.677,84 miliar. Pada tahun 2018 anggaran naik sebesar Rp. 808.702.870.684,84 miliar dan yang teresalasi sebesar Rp. 758.514.064.354,45 miliar, kemudian pada tahun 2019 anggaran naik Rp. 865.037.328.039,00 miliar, yang terealisasi Rp. 827.465.026.349,56 miliar. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 855.941.060.021,35 miliar, terealisasi sebesar 812.324.184.586,00 miliar. Penurunan jumlah belanja dari total yang di anggarkan tersebut terakumulasi pada pos belanja operasi dan belanja modal. Dengan demikian maka berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan Asli Daera (PAD) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato mengalami Fluktuasi.

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayati, 2016) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013”. Dimana hasil yang diperoleh menunjukan bahwa ada kinerja keuangan pemerintah yang belum optimal. Namun, pada penelitian ini Rahmayati menggunakan beberapa

teknik analisis data rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio DSCR.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temui di Kabupaten Pohuwato, dan setelah di lakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu maka sebagai peneliti di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato, peneliti tertarik untuk menganalisa lebih dalam terkait **“Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi – Potensi Daerah yang di manfaatkan sebagai sumber PAD belum terkelolah dengan baik.
2. Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Pohuwato pada dana transfer pusat masih tergolong tinggi
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato belum memiliki sangsi tegas terhadap pihak – pihak yang tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya baik sebagai pemungut maupun sebagai pembayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan semula di rencanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang di perlukan, maka penulis menetapkan batasan dalam masalah ini yaitu peneliti hanya berfokus pada Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian, dan

Pertumbuhan pengelolaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan”.

1.5 Maksud dan tujuan penelitian

1.5.1 Maksud penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data Kinerja Keuangan Pemerintah, disamping itu untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangannya.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu “Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan”.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan acuan bagi penulis Selanjutnya terutama menegenai Kinerja Keuangan Pemerintah ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran.

2. Manfaat Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten pohuwato.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian teori

2.1.1 Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan suatu usaha pertanggungjawaban baik secara personal maupun lembaga/instansi pemerintah terhadap wewenang administrasi yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas seringkali juga disebut *accountable* dalam bahasa inggris, yang artinya adalah “sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan”. Tanggung jawab yang di emban oleh pemerintah terkait pengelolaan sumber daya yang ada, pelaksanaan dan penyampaian informasi berbagai aktivitas dan kegiatan penggunaan sumber daya tersebut dan melaporkan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut (Mahmudi, 2010).

(Zirman & Muhammad, 2010) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya baik itu berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Adapun persyaratan yang harus terpenuhi agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercapai antara lain adalah sistem pemerintahan harus dapat menjamin bahwa segala sumber daya yang dimiliki harus mampu memiliki aksesibilitas secara umum, pimpinan dan seluru staf di instansi tersebut memiliki komitmen tinggi, dapat menunjukan hasil pencapaian kinerja dengan baik, selalu berusaha untuk mencapai visi dan misi organisasinya, memiliki manfaat yang besar,

transparan, objektif, jujur, akurat, dan maupun ketidak berhasilan terhadap target sasaran dan tujuan yang dinginkan (Nurina dan Yahya, 2016).

(Wiwik andriani, 2015) Dalam menghasilkan akuntabilitas erat kaitannya dengan konsep value for money ialah:

1. Ekonomi, ialah perolehan input dengan mutu serta kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi ialah perbandingan input serta input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.
2. Efisiensi, ialah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu ataupun pemakaian input yang terendah guna menggapai output tertentu. Efisiensi ialah perbandingan output/ input yang di kaitkan dengan standarkinerja ataupun target yang telah diresmikan.
3. Efektifitas, yaitu tingkatan pencapaian hasil program dengan sasaran yang ditetapkan. Secara efektifitas ialah perbandingan outcome dengan output.

2.1.2 Jenis jenis Akuntabilitas

(Ihyaul Ulum, 2010:41) mengemukaan bahwa akuntabilitas terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabilitas Kinerja

Infres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menggambarkan adanya kemauan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur

yang dapat diciptakan pemerintah agar lebih baik lagi. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki *sense of accountability* dan mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atas pemberian amanah kepada pejabat pemerintah.

2.1.3 Dimensi Akuntabilitas

(Ellwood, 1993) dalam(Mardiasmo, 2004, 21) menarangkan bahwa ada empat ukuran akuntabilitas yang wajib dipadati oleh organisasi bagian publik ialah:

1. Akuntabilitas kejujuran serta akuntabilitas hukum.

Akuntabilitas ini terpaut dengan penghindaran penyalagunaan jabatan. Sebaliknya akuntabilitas hukum terpaut dengan jaminan terdapatnya kepatuhan hukum serta peraturan lain yang di syaratkan dalam pemakaian sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terpaut dengan apakah prosedur yang di pakai dalam melakukan tugas telah lumayan baik. dalam perihal ini kecukupan sistem data akuntansi, sistem data manajemen serta prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terpaut dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan bisa dicapai ataupun tidak, serta apakah sudah memikirkan alternative program yang membagikan hasil yang maksimal dengan anggaran yang minimun.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terikat dengan pertanggungjawaban pemerintah, abik pusat ataupun wilayah atas kebijakan kebijakan yang di ambil pemerintah terhadap DPR/ DPRD serta publik luas.

2.1.4 Tipe-Tipe Akuntabilitas Publik

tipe akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya dibagimengjadi dua bagian meurut (Ihya Ulum, 2010:42) yaitu :

1. akuntabilitas internal, yaitu berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaran negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas inrenal tersebut, telah diamanatkan dalam indukstri Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas eksternal, yaitu melekat pada setiap negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amant yang telah di terima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.1.5 Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Halim, 2007:65) akuntansi sektor publik adalah para pengambilan keputusan yang membutuhkan informasi untuk menjalankan aktifitas di masing-masing bidang. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga merupakan alat komunikasi antara organisasi, baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba, dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi adalah salah satu sumber informasi yang di susun oleh organisasi. Mengingat betapa pentingnya organisasi nirlaba, khususnya organisasi pemerintahan yang banyak bergerak dalam aktifitas pelayanan umum, perlu dibentuk akuntansi tersendiri sebagai *service activity* untuk menyediakan informasi dalam rangka pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintahan.

Menurut (Mardiasmo, 2002) Akuntansi Sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

(Bastian, 2001:6) pengertian akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang di terapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga – lembaga tinggi berkepentingan atas berbagai alternative arah tindakan.

2.1.6 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan imformasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

Memberikan imformasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi

2. pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Dari definisi teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor publik memiliki peranan yang penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Di katakan demikian karena akuntansi sektor publik merupakan dasar dari pengambilan keputusan, sebagai sumber informasi dan serta alat komunikasi antara organisasi baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba.

2.1.7 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Definisi kinerja adalah kesuksesan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan

berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. (Sutrisno, 2016)

Munurut (Veizal Rivai, 2004:309) Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam suatu organisasi.

2.1.8 Definisi Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Kuswandi, 2016) Keuangan Daerah adalah semua Hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban tersebut.

2.1.9 Definisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang diciptakan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. (Sari, 2016)

(Masdiantini & Erawati, 2016) Kinerja keuangan pemerintah daerah bisa diukur dengan menggunakan Rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, serta efisiensi. Kemandirian menunjukkan keahlian pemerintah wilayah membiayai penyelenggaran pemerintahannya sendiri dengan memakai Pemasukan Asli Wilayah yang diperolehnya. Ekonomi menunjukkan tingkatan kehematan pengeluaran- pengeluaran pemerintah wilayah. Efektivitas membuktikan realisasi

penghasilan yang bisa dicapai oleh pemerintah wilayah. Efisiensi menunjukkan seberapa besar bayaran yang dikeluarkan buat menggapai realisasi pemasukan.

Menurut(Sularso serta Restianto, 2011) mengatakan kinerja keuangan merupakan sesuatu dimensi kinerja yang memakai penunjuk keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dicoba guna memperhitungkan kinerja masa kemudian dengan melaksanakan bermacam analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili kenyataan entitas serta potensi- kemampuan kinerja yang hendak bersinambung.

(Mardiasmo, 2009) Berkata Kinerja keuangan merupakan salah satu dimensi yang bisa digunakan buat membenarkan keahlian daerah dalam melakukan

Ketentuan penerapan keuangan secara baik serta benar guna mempertahankan layanan yang di idamkan, di mana evaluasi yang lebih besar jadi tuntutan yang wajib dipadati supaya pihak eksternal memutuskan buat berinvestasi di dalam daerah. Pengukuran kinerja yang bersumber dari data financial semacam laporan keuangan, diukur bersumber pada anggaran yang sudah terbuat. Berlandaskan statment di atas bisa disimpulkan kalau kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan pencapaian atas sesuatu program/ kebijakan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah sepanjang periode tertentu yang bisa diukur memakai penunjuk keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu kerja dan hasil pada bidang keuangan daerah dengan menggunakan system keuangan untuk mencapai tingkat kinerja

keuangan yang di tetapkan melalui kebijakan dan ketentuan dalam satu periode tertentu.

2.1.10 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

(Mahsun, 2016:25) Pengukuran kinerja merupakan sesuatu proses evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan serta sasaran yang sudah diditetapkan tadinya, termasuk informasi atas efisiensi pemakaian sumber energi dalam menciptakan benda serta jasa, mutu benda serta jasa, hasil aktivitas dibanding dengan iktikad yang di idamkan serta daya guna kegiatan dalam menggapai tujuan.

2.1.11 Tujuan pengukuran kinerja

Tujuan pengukuran kinerja menurut (Mahmudi, 2005) adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tujuan atau maksud dalam berorganisasi. Adapun fungsi dari penilaian kinerja ini yaitu sebagai acuan yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu tujuan dan menunjukkan atau menggambarkan bagaimana organisasi tersebut bisa dikatakan sudah berproses sesuai dengan maksud atau justru menyimpang dari dari tujuan yang diterapkan.
2. Mengadakan suatu alat/sarana pembelajaran pegawai. Penilaian dari kriteria ini yaitu mengenai dari Tindakan yang seharusnya diterapkan dalam suatu kinerja. Dalam hal ini meliputi perubahan sikap, perilaku, keterampilan serta pengetahuan lainnya mengenai Tindakan yang harus dimiliki pegawai demi tercapainya sistem kinerja yang baik.

3. Lebih memperhatikan kinerja untuk periode-periode selanjutnya dalam hal ini yaitu kinerja terbentuk budaya berprestasi pada sebuah organisasi dengan menciptakan suatu situasi dimana sikap individual di dalam organisasi diharapkan atau di haruskan untuk memiliki kinerja yang lebih sehingga individual tersebut terlihat berprestasi.
4. Diberikannya pertimbangan yang sistematik di dalam menciptakan pemeberian penghargaan keputusan serta hukuman. Adapun organisasi yang di maksud yakni yang memiliki kinerja tinggi. Organisasi tersebut berupaya membuat suatu sistem penghargaan. Contohnya kenaikan gaji atau bonus lainnya. Adapun hal lain berupa hukuman, dalam hal ini misalnya penundaan promosi serta teguran mengenai keterampilan, serta kontribusi dalam berorganisasi.
5. Dorongan bagi pegawai/motivasi pegawai. Sehingga bentuk dari mengapresiasi kinerja maka pegawai yang kinerjanya lebih tinggi maka akan mendapatkan penghargaan.
6. Menciptakan akuntabilitas publik. Penilaian yang dimaksud yaitu menunjukan seberapa berpengaruhnya kinerja manajerial dalam pencapaian penilaian akuntabilitas. Kinerja ini selanjutnya harus di ukur dan dilaporkan dalam bentuk sebuah laporan kinerja yang nantinya akan menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja organisasi. Hal ini tentunya sangat berguna untuk pihak internal dan juga eksternal dalam sebuah organisasi.

2.1.12 Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah:

1. Masukan (input) merupakan tolak ukur kinerja bersumber pada tingkatan ataupun besaran sumber dana, Sumber energi manusia, material, waktu, teknologi, serta sebagainya yang digunakan guna melakukan program ataupun aktivitas.
2. Keluaran (out put) merupakan tolak ukur kinerja bersumber pada 5 produk(benda ataupun jasa) yang dihasilkan dari program ataupun aktivitas sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (out come) merupakan tolak ukur kinerja bersumber pada tingkatan keberhasilan yang dicapai bersumber pada tingkatan keluaran program ataupun aktivitas yang telah dilaksanakan.
4. Arti (benefit) merupakan tolak ukur kinerja bersumber pada tingkatan kemanfaatan yang bisa dialami selaku nilai tambah untuk warga serta pemerintah wilayah dari hasil.
5. Akibat (impact) merupakan tolak ukur kinerja bersumber pada akibatnya terhadap keadaan makro yang ingin dicapai dari manfaat. (Fadillah & Muhtar, 2004:32)

Menurut (Halim, 2007) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam:

1. Menilai Kemandirian Keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi Daerah.

2. Mengukur Efektifitas dan Efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Daerah.
3. Mengukur sejauh mana Aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan Pendapatan Daerahnya.
4. Mengukur Kontribusi masing-masing sumber Pendapatan dalam pembentukan Pendapatan Daerah.
5. Melihat Pertumbuhan atau perkembangan perolehan Pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama waktu periode tertentu.

2.1.13 Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat Pengukuran Kinerja Wayne C. Parker (1996:3) mengatakan lima manfaat yang terdapat dalam pengukuran kinerja entitas pemerintahan, ialah:

1. Pengukuran kinerja tingkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kerap kali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan informasi serta bermacam pertimbangan politik dan tekanan dari pihak- pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini hendak membolehkan pemerintah buat memastikan misi serta menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu bisa pula diseleksi tata cara pengukuran kinerja guna memandang kesuksesan program yang didapat. Di sisi lain, terdapatnya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif bisa memfokuskan kepedulian pada hasil yang didapat, kemudian melakukan penilaian yang benar terhadap penerapan anggaran dan melaksanakan dialog untuk usulan- usulan program baru.
2. Pengukuran kinerja tingkatkan akuntabilitas internal. Dengan terdapatnya pengukuran kinerja ini, secara otomatis hendak terbentuk akuntabilitas di

segala lini pemerintahan, dari lini terbawah hingga paling atas. Lini paling atas juga setelah itu hendak bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam perihal ini dianjurkan konsumsi system pengukuran standar semacam halnya management by objectives buat mengukur outputs serta outcomes. Akuntabilitas serta Pengukuran Kinerja Pemerintah.

3. Pengukuran kinerja memiliki peranan penting dalam proses peningkatan akuntabilitas publik. Sekalipun oleh Sebagian pihak adanya laporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat menjadi hal yang ditakuti, namun tetap saja publikasi laporan sangat berpengaruh dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik.

Adanya kerja sama masyarakat pada pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan tentunya kualitas dari hasil suatu program akan lebih diperhatikan.

4. Pengukuran kinerja mendorong perencanaan strategis serta penerapan maksud tujuan. Tahap perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti apabila tanpa adanya kesanggupan untuk mengukur kinerja kemajuan suatu program tanpa ukuran tersebut suksesnya suatu program tidak akan pernah meliputi penilaian dari objektif.
5. Pengukuran kinerja bisa menjadi suatu entitas dalam menentukan bagaimana penggunaan sumber daya secara teratur atau efektif. Dalam penilaian program-program pokok pemerintah masyarakat sudah sangat kritis, hal ini sehubungan dengan semakin tingginya pajak yang dikenakan kepada mereka. Evaluasi ataupun perubahan yang dilakukan lebih berdasarkan pada penilaian

bagaimana atau dari sisi mana pemerintah sudah melakukan pelayanan yang baik pada masyarakat. Pemerintah juga diberikan kesempatan dalam hal menyerahkan Sebagian pelayanan publik untuk ditangani oleh sektor swasta namun tetap menggunakan prinsip pelayanan yang teratur agar terciptanya pelayanan yang terbaik.

2.1.14 Keterbatasan Pelaporan Pengukuran Kinerja

Untuk menilai akuntabilitas pemerintah tentunya tidak hanya dengan menggunakan alat pengukuran kinerja saja. Seperti halnya dengan keterbatasan laporan pengukuran kinerja lainnya. Adapun yang perlu dipahami oleh pengguna dalam proses pelaporan kinerja agar sumber informasi yang diperoleh bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya tentunya meliputi adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu dan keterbatasan tersebut antara lain yaitu:

1. Untuk menginformasikan hal penting dalam pembentukan keputusan ekonomi,sosial dan politik.
2. Untuk sarana akutabilitas publik
3. Untuk menginformasikan hal apa saja yang terkait dalam mengevaluasi kinerja menejerial dan organisasi.

Mengenai standar akuntasi pemerintah, undang-undang peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang didalamnya menyebutkan bahwa ada standar akuntansi pemerintah memiliki komponen-komponen salah satunya adalah komponen tentang laporan realisasi anggaran (LRA), komponen tersebut menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pada suatu periode pelaporan dalam permendagri nomor 59 tahun 2007

mengenai pedoman penegelolaan keuangan daerah, Adapun unsur yang terdapat pada laporan realisasi anggaran terdiri dari dari:

1. Pendapatan

Perihal penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran itu menjadi hak pemda. Pendapatan tersebut meliputi PAD. Dana perimbangan, dan pendapatan yang sah lainnya.

2. Belanja

Seluruh pengurangan kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran tersebut, dan tidak akan diperoleh Kembali pembayarannya oleh Pemda. Dalam hal ini Adapun jenis dari dari belanja yaitu meliputi belanja aparatur daerah, belanja pelayan publik serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

3. Pembiayaan

Hal ini menyangkut penerimaan yang seharusnya diadakan pembayaran Kembali atau penegeluaran yang diterima Kembali, baik pada periode anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran selanjutnya, yang pada penggunaan anggaran pemda yang bertujuan untuk menutupi definisi atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.1.15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan daerah adalah hasil dari proses Akuntansi Keuangan Daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, untuk digunakan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal (Mahsun, Sulistiyowati, & Purwanugraha, 2015:92).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan ini untuk menciptakan Akuntabilitas. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidak-tidaknya meliputi: Laporan Realisasi APBD Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi Realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pемbiayaan, dan sisa lebih/kurang pемbiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Menurut (Diamond,2002) Informasi keuangan didalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan hutang yang mereka kelola.
2. Meningkatkan Transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas

informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

(Ratmono&Solihin 2017:10), Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pokok Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
5. Lampiran Laporan Keuangan BUMD.

Dari lima jenis laporan tersebut biasanya yang dipublikasikan di media massa hanya tiga laporan utama yaitu:Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah di capai.

2.1.16 Tujuan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut (Halim, 2007:67) tujuan pelaporan keuangan akuntansi Pemerintah terbagi atas empat, yaitu:

1. Untuk menunjukkan kondisi keuangan organisasi;
2. Untuk menunjukkan hasil operasi organisasi;

3. Untuk menunjukan perubahan kondisi keuangan organisasi; dan
4. Untuk menunjukan kesesuaian pelaksanaan aktifitas dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

Menurut (Mahmudi, 2010) Secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik.
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang didalamnya memiliki komponen-komponen salah satunya adalah komponen tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Komponen tersebut menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang di Kelola dalam satu periode pelaporan. Dalam permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Adapun unsur yang terkandung dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan

Semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemda, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

2. Belanja

Semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh Kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi tiga jenis yaitu: belanja aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau penegeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokan menjadi dua sumber yaitu sumber penerimaan Daerah dan sumber Pengeluaran Daerah.

2.1.17 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Wachid, 2014:2) “Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah” Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan LRA tersebut pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis keserasian belanja.

Menurut (Mahmudi, 2010:135) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

yang meliputi dalam Kinerja ini adalah analisis varians yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. dan analisis rasio keuangan yang terdiri dari derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan daerah dan rasio efektivitas PAD.

2. Analisis Kinerja Belanja Daerah

Kinerja ini meliputi analisis terhadap selisih antara Realisasi dengan belanja anggaran daerah, kemudian analisis keserasian belanja daerah yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal, dan analisis efisiensi belanja daerah berguna untuk mengukur tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1.18 Teknik Analisis Kinerja Keuangan

Menurut (Mahmudi, 2010) Analisis Laporan Keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Teknik Analisis Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Analisis (Selisih)

Analisis pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan Realisasi Anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan Realisasi. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: selisih yang menyenangkan dan tidak menyenangkan.

2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis Rasio Keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen Laporan Keuangan. Analisis Rasio Keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja organisasi lain yang sejenis. Contoh Analisis Laporan Keuangan yaitu: Analisis Aset, analisis likuiditas, solvabilitas ekuitas, dan lain-lain.

4. Analisis Pertumbuhan (trend)

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupakenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja. Analisis pertumbuhan atau trend dapat diaplikasikan misalnya untuk menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus deficit, dan lain-lain.

5. Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan guna menguji pengaruh variabel independen terhadap varibel independen. Analisis regresi berguna buat kebijakan publik yang hasilnya bisa di aplikasikan oleh Pemerintah Wilayah.

6. Analisis prediksi

Informasi laporan keuangan pula bisa digunakan buat analisis prediksi ataupun proyeksi. Misalnya buat memprediksi pemasukan tahun depan ataupun digunakan informasi tahun ini serta sebagian tahun kemudian selaku dasar prediksi.

2.1.19 Analisis Rasio Keuangan Daerah

(Halim, 2007:231) mengatakan analisis keuangan yaitu suatu bentuk upaya pemahaman terhadap ciri-ciri keuangan yang diambil dari laporan yang ada. Adapun salah satu cara yang digunakan untuk mengkaji suatu laporan keuangan pada pemerintah yaitu dengan menggunakan Rasio Keuangan.

Analisis Rasio pada sektor publik utamanya pada APBD masih belum banyak dilakukan, hal ini berdampak bahwa sampai saat ini berdasarkan teori belum ada kepastian secara resmi mengenai nama serta kaidah pengukurannya. Namun demikian, adanya pengelolaan keuangan daerah yang tidak tertutup, jujur, demokratis, efektif efisien, serta akuntabel harus tetap diadakan sekalipun kaidah mengakuntasikan APBD tidak sama dengan laporan keuangan yang diterapkan pada perusahaan swasta.

Pengukuran Rasio keuangan pada APBD di dasari pada perbandingan hasil yang diperoleh dari suatu periode sebelumnya, sehingga bisa diketahui apa yang menjadi permasalahannya. Hal lain yang bisa dilakukan yakni

membandingkan rasio milik pemda tertentu dengan rasio keuangan pemerintah lain ataupun dengan daerah yang potensinya sama dalam hal menganalisis bagaimana bentuk keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya.

Adapun pihak yang memiliki hubungan penting dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu:

1. DPRD atau umumnya dikenal sebagai wakil pemilik daerah (rakyat)
2. Ketua pemerintah atau eksekutif, sebagai dasar dalam penyusuan APBD berikutnya
3. Pemerintah pusat, sebagai acuan dalam mendorong terlaksananya penegelolaan keuangan daerah
4. Rakyat dan kreditur, yang berperan sebagai acuan pihak yang ikut serta dalam kepemilikan saham pemda. Dalam hal ini siap memberi penjamanan dan memberi obligasi.

Halim, (2007:232). Berpendapat bahwa dalam hal ini ada beberapa Rasio yang di adakan pemahaman lebih luas terkait dengan data keuangan dari APBD diantaranya: mengadakan analisa hubungan dari berbagai persamaan dalam suatu laporan keuangan merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu pemerintahan dalam menjalankan kegiatan keuangan per periodenya.

(Ridwan Sundaja, 2000:104) mengatakan “Analisis Rasio Merupakan Metode Perhitungan dan interpretasi Rasio Keuangan untuk menilai Kinerja Suatu Pemerintahan”. Dan menurut (Van Home, 2000:133) mengatakan “Rasio

Keuangan atau Indeks dua data keuangan dengan jalan berbagi satu data dengan data yang lainnya.

Dari berbagai definisi mengenai Rasio Keuangan Daerah diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. alat analisis tersebut memiliki peranan penting dalam proses pengelolaan Keuangan. Selain itu Rasio Keuangan Daerah juga dapat menjadi salah satu metode untuk menilai Kinerja suatu Pemerintahan.

2.1.20 Pengukuran Rasio Keuangan Daerah

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah Salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Rasio tersebut beberapa diantaranya adalah: Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Rasio Kemandirian.

1. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi Rill Daerah dalam menjalankan tugas. dikategorikan Efektif apabila Rasio yang dicapai minimal sebesar 1(satu) atau 100 persen. Semakin tinggi Rasio Efektifitas berarti kemampuan Daerah semakin baik. (Halim, 2012)

Rumus Rasio Efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Abdul Halim (2012)

2. Rasio Efesiensi

Rasio Efesiensi adalah Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan yang diterima. Kemampuan Daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan Efisien apabila Rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil Rasio Efesiensi menggambarkan kemampuan Daerah yang semakin baik.

Rumus Rasio Efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentasi Efisiensi	Kriteria Efisiensi
> 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2012)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

(Halim, 2012) Rasio kemandirian menjelaskan tentang bagaimana tingkat ketergantungan suatu daerah pada sumber pendapatan dana eksternal atau

khususnya dana dari pemerintah pusat. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan eksternal semakin rendah.

Adapun sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian membuktikan bahwa semakin rendah bentuk partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan faktor utama pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Rumus Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat} \\ \text{dan pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3 Kriteria Kemandirian

Presentase Kemandirian	Kriteria Kemandirian
0-25	Sangat Rendah
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

Sumber: (Halim, 2002)

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, digunakan sebagai bahan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu diperhatikan.

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah

(TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Adapun rumus rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Total PAD tahun terakhir} - \text{tahun sebelumnya}}{\text{Tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 2. 4 Kriteria rasio pertumbuhan

Presentase pertumbuhan	Kriteria Pertumbuhan
0% - 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50% - 100%	tinggi

Sumber : (Halim, 2012)

2.2 Penelitian Terdahulu

Rahmayati (2016) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013”. Dengan menggunakan metode Deskriptif. Dimana hasil yang diperoleh menunjukan bahwa ada kinerja keuangan pemerintah yang belum optimal. Namun, pada penelitian ini Rahmayati menggunakan beberapa teknik analisis data rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio DSCR.

Ni Ketut Erna Rahmawati (2016) dalam judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektifitas PAD dari tahun 2010 sampai 2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa, tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan Daerah ditempati oleh dana perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja Daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata tingkat belanjanya pada tahun 2010-2012 tergolong ekonomis.

Ruliyati (2019). Dalam judul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone” dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan social kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,19% pada tahun 2014 menjadi 4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari uraian di atas maka penulis mencoba membangun suatu pemikiran tentang Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Adapun alur penelitian dari penelitian ini di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Satibi (2011) mengungkapkan objek penelitian merupakan alat pengidentifikasi serta pemetaan fenomena lingkungan menuju tujuan penelitian guna menggambarkan secara komprehensif. Objek penelitian adalah hal menjadi sasaran penelitian (Kamus bahasa Indonesia ; 1989:862). Menurut (Supranto, 2000:21) Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Dipertegas (Anto Dayan, 1986:21) Objek penelitian adalah suatu pokok persoalan yang akan diteliti agar mendapatkan data secara lebih terarah. Dapat dikatakan bahwa objek penelitian adalah fakta, realita dan kenyataan.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah pada “Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato”. Yang berlokasi di JL. M. H. Thamrin, Palopo, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo 96265.

3.2 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmia untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun menurut (Arikunto, 2002:136) metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi.

3.3 Metode penelitian yang di gunakan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif. Yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu kondisi dengan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. (Sugiyono, 2004:11) mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang digunakan, serta dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti.

Menurut (Sugiyono, 2011) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi atau abstraksi.

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif menurut (Sulistyo-Basuki, 2010:78) adalah untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang di teliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang di teliti yang keseluruhannya tidak dapat di ukur dengan angka-angka. Dan menurut (Prastowo 2012:45) penelitian kualitatif lebih menekankan induktif, bukan deduktif.

3.4 Oprasional Variabel

Oprasional Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38).

Yang menjadi oprasional variabel pada penelitian ini adalah “ Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah” yang meliputi sebagai berikut :

1. Efektivitas, yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.
2. Efesien, yaitu penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu dan usaha atau tenaga, untuk mencapai tujuan dalam melakukan kegiatan.
3. Kemandirian, yaitu suatu hal yang dapat berdiri sendiri atau tidak berketergantungan pada siapapun.
4. Pertumbuhan, yaitu adalah Daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan Pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya.

Dari definisi mengenai hal yang meliputi operasional di atas sehingga dapat di rumuskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

VARIABEL	DIMENSI	SKALA
	Efektivitas Realisasi Penerimaan PAD Target PAD yang ditetapkan	X 100% Rasio
Pengukuran Kinerja	Efisiensi Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD Realisasi Penerimaan PAD	X 100% Rasio
Keuangan Pemerintah	Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pemerintah Pusat Dan pinjaman	X 100% Rasio
	Total pendapatan Daerah Tahun Akhir – Tahun sebelumnya	
	Pertumbuhan Tahun Sebelumnya	X 100% Rasio

Sumber: (Halim, 2012)

3.5 Jenis Data Dan Sumber Data

3.6 Jenis Data

Data dapat diartikan sebagai kumpulan angka, fakta, fenomena atau keadaan yang merupakan hasil pengamatan, pengukuran atau pemecahan terhadap karakteristik atau sifat dari objek yang dapat berfungsi untuk membedakan objek yang satu dengan yang lainnya pada sifat yang sama (Solimin, 2001).

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang mencakup hampir semua data non numerik.

Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau di analisis menggunakan Teknik perhitungan matematika statiska.

3.7 Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2014:3) pengertian sumber data merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian dari pihak lain.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2014:62) Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Teknik pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data yang telah selesai sebelumnya. Terdapat beberapa Teknik pengumpulan data misalnya dengan interview (wawancara), Observasi,

kuisioner, dan gabungan ketiganya. Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Dalam penelitian ini peneliti akan memaksimalkan Observasi melalui pengamatan serta pemahaman terhadap objek yang akan diteliti sehubungan dengan hal ini, untuk mempermudah ingatan peneliti, maka akan digunakan beberapa bantuan berupa catatan kecil serta alat bantu lainnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan narasumber (Moleong, 2005). Wawancara dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data dimana sumber data untuk melengkapi penelitian ini berupa gambar yang tujuannya untuk memberi informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020.

3.9 Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari makna dari sekumpulan data hingga dapat dituangkan dalam pembahasan temuan penelitian. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Deskriptif. Dengan kata lain Metode

ini digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Metode deskriptif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Metode deskriptif menggunakan Analisis Rasio Keuangan dilakukan dengan cara meneliti dan membahas data yang telah dikumpulkan berupa laporan keuangan, lalu dihitung besarnya nilai rasio kemudian diinterpretasikan guna mendapatkan suatu gambaran yang jelas serta kesimpulan masalah yang diteliti.

Beberapa rasio yang digunakan dalam menganalisis Laporan Realisasi Anggaran untuk mendapatkan gambaran terkait kinerja keuangan dari badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten pohawato diantaranya:

1. Rasio Efektifitas

$$\textbf{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi

$$\textbf{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian

$$\textbf{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat & Pinjaman}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan

$$\textbf{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Total pendapatan Daerah}}{\frac{\text{Tahun Akhir} - \text{Tahun sebelumnya}}{\text{Tahun Sebelumnya}}}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Blok Perkantoran Marisa, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan 12 Maret 2022.

4.1.2 Sejarah Terbentuknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Pohuwato

Satuan Kerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsinya, di arahkan pada terwujudnya tata kelola keuangan yang tertib, taat azaz, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kinerja tata kelola dan sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas pencapaian program dan kegiatan serta sifat-sifat yang mendukungnya, maka disusunlah profil BKD ini.

Sebagai salah satu satuan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang terbentuk melalui peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kabupaten Pohuwato, satuan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah satuan organisasi Yang memiliki kewenanganpengelolaan keuangan daerah

melalui tata kelola keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang – undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang baik tersebut, tentunya diperlukan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang tepat, terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Untuk menjamin kualitas pelayanan keuangan terbaik. Disamping itu, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah menjadi suatu konsukwensi penting dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan pada organisasi BKD.

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kinerja pelayanan satuan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato, serta sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas pencapaian program dan kegiatan serta sifat-sifat yang mendukungnya, maka disusunlah Profil BKD ini. Sebelumnya, dapat digambarkan sejarah singkat berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pohuwato menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) dan adapun periode perjalanan waktu sampai dengan terbentuknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

a. Periode tahun 2003 – 2004

Sejak terbentuknya Kabupaten Pohuwato sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Boalemo pada bulan Oktober Tahun 2003, pengelolaan keuangan kabupaten pohuwato masih dalam bentuk APBD mini yang merupakan pelimpahan sebagai anggaran dari APBD kabupaten induk Kabupaten

Boalemo. Organisasi pengelola keuangan ini adalah bagian keuangan pada sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

b. Periode tahun 2004 – 2006

Sejak tahun 2004 sampai dengan 2006, pengelolaan keuangan Kabupaten Pohuwato berada dibawah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, sedangkan pengelolaan pendapatan daerah dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

c. Periode tahun 2006 – 2008

Dengan berlakunya peraturan daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 01 Tahun 2006 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pohuwato, maka pengelolaan keuangan daerah dibentuk dalam suatu organisasi yaitu badan pengelolaan keuangan daerah yang disingkat BPKD. Dalam pelaksanaannya, Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Bagian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah dilebur menjadi Badan Pengelola keuangan Daerah (BPKD). Yang dipimpin oleh kepala BPKD : Drs. H. Amin Haras

d. Periode tahun 2008 – 2013

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 01 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kabupaten Pohuwato, pengelolaan keuangan daerah dibentuk dalam suatu organisasi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPKAD. Perbedaan antara periode sebelumnya adalah sejak tahun 2008, pengelolaan aset daerah yang sebelumnya ditangani oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Pohuwato selanjutnya dilebur dan menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi BPKAD.

e. Periode 2013 – 2016

Dengan berlakunya peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 tentang peraturan daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kabupaten Pohuwato, terjadi perampungan organisasi yakni BPKAD yang sebelumnya terdiri dari 4 (empat) bidang selanjutnya menjadi 3 (tiga) bidang. Bidang yang dirampingkan adalah bidang pendapatan. Bidang pendapatan tidak lagi menjadi bagian dalam organisasi dan tata kerja BPKAD.

f. Periode 2017 s/d sekarang

Dengan berlakunya peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2013 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Berdasarkan OPD baru Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari 6 bidang.

Berdasarkan periode diatas tersebut, yang pernah menjabat kepala keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- Periode tahun 2006 s.d 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) : Bpk. Drs. Amin Haras,
- Periode Tahun 2008 s.d 2010 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) : Bpk. Hi. Drs. Amin Haras
- Periode tahun 2010 s.d 2012, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Negara (BPKAD) : Alm. Bpk. Hi. Arifin Mbuinga, S.Pd.

- Periode Tahun 2012 s.d 2016 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) : Drs. Hi Achmad Djuuna.
- Periode 2017 Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) : Iskandar Datau, S.Sos, M.Si

4.1.3 Visi Dan Misi

Visi

Terwujudnya tata kelola keuangan Daerah yang akuntabel berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

Misi

1. Meningkatkan SDM aparatur pengelola keuangan Daerah yang profesional dan berintegritas
2. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan keuangan Daerah dengan mengedepankan supremasi hukum
3. Menigkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan Daerah yang berbasis teknologi informasi

4.1.4 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah sebagaimana di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud tersebut, Badan Keuangan Daerah mempunyai Fungsi :

1. Menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
2. Menyelenggarakan pembinaan keuangan daerah;
3. Menyusun pedoman, rancangan dan perhitungan anggaran sebagai bahan penyusunan RAPBD dan perubahan RAPBD;
4. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Menyusun, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
7. Melaksanakan fungsi pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Rasio Efektifitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang di rencanakan lalu di bandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil Daerah. Halim (2012)

Data penelitian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2017 – 2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 terget dan realisasi PAD kabupaten pohuwato

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD
2017	69.387.597.124,85	70.687.310.318,00
2018	52.151.698.921,04	60.636.332.336,00
2019	62.337.943.760,48	66.564.152.234,00
2020	50.953.585.078,00	74.201.375.007,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan data target dan realisasi PAD yang di sajikan sebelumnya maka perhitungan rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk tahun 2017 -2020 dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 2017 &= \frac{\text{Rp. } 69.387.597.124,85}{\text{Rp. } 70.687.310.318,00} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,9816 \text{ atau } 98,16 \%} \\
 2018 &= \frac{\text{Rp. } 52.151.698.921,04}{\text{Rp. } 60.636.332.336,00} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,8600 \text{ atau } 86,01 \%} \\
 2019 &= \frac{\text{Rp. } 62.337.943.760,48}{\text{Rp. } 66.564.152.234,00} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,9365 \text{ atau } 93,65 \%} \\
 2020 &= \frac{\text{Rp. } 50.953.585.078,00}{\text{Rp. } 74.201.375.007,00*} \times 100\% \\
 &= \mathbf{0,6866 \text{ atau } 68,67 \%}
 \end{aligned}$$

Setelah di lakukan perhitungan dengan rumus Efektivitas dapat di ketahui nilai rasio efektivitas PAD dan interpretasi nilai efektivitas PAD Kabupaten Pohuwato pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Abdul Halim (2012)

Tabel 4. 3 Efektivitas Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Kemampuan Keuangan
2017	98,16 %	Efektif
2018	86,01 %	Cukup Efektif
2019	93,65 %	Efektif
2020	68,67 %	Kurang Efektif

4.2.2 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Halim, 2012)

Data penelitian terkait biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD dan Realisasi penerimaan PAD kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2017 – 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 4 biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD dan Realisasi penerimaan PAD

Tahun	Biaya yang dikeluarkan Untuk memungut PAD	Realisasi Penerimaan PAD
2017	3.000.000.000	69.387.597.124,85
2018	6.000.000.000	52.151.698.921,04
2019	7.000.000.000	62.337.943.760,48
2020	0,00	50.953.585.078,00

Sumber Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan data biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD dan Realisasi Penerimaan PAD yang di sajikan sebelumnya maka perhitungan Rasio Efisien Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017 - 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$2017 = \frac{\text{Rp. } 3.000.000.000}{\text{Rp. } 69.387.597.124,85} \times 100\%$$

	=	0,0432 atau 4,32 %
2018	=	$\frac{\text{Rp. } 6.000.000.000}{\text{Rp. } 52.151.698.921,04} \times 100\%$
	=	0,1150 atau 11,50 %
2019	=	$\frac{\text{Rp. } 7.000.000.000}{\text{Rp. } 62.337.943.760,48} \times 100\%$
	=	0,1122 atau 11,22 %
2020	=	$\frac{\text{Rp. } 0,00}{\text{Rp. } 50.953.585.078,00} \times 100\%$
	=	0 %

Setelah melakukan perhitungan dengan rumus Efisien dapat diketahui nilai Rasio Efisien PAD dan interpretasi nilai Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 5 Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2012)

Tabel 4. 6 Efisiensi Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020

Tahun	Rasio Efisiensi	Kriteria Kemampuan Keuangan
2017	4,32 %	Sangat Efisien
2018	11,50 %	Sangat Efisien
2019	11,22 %	Sangat Efisien
2020	0 %	Sangat Efisien

4.2.3 Rasio Kemandirian

Rasio ini mengukur seberapa besar kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dengan membandingkan jumlah PAD dengan jumlah transfer baik dari Pusat maupun Provinsi dan pinjaman Daerah.

Data penelitian pendapatan asli daerah, bantuan pemerintah pusat dan pinjaman kabupaten pohuwato tahun anggaran 2017 -2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 7 data pendapatan asli daerah, bantuan pemerintah pusat, dan pinjaman.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat	Bantuan Pemerintah Pusat Lainnya
2017	69.387.597.124,85	641.292.929.995,00	87.766.521.000,00
2018	52.151.698.921,04	702.676.142.423,00	106.073.314.000,00
2019	62.337.943.760,48	740.354.936.381,00	120.987.917.000,00
2020	50.953.585.078,20	723.282.363.424,00	120.170.204.412,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten pohuwato.

Berdasarkan data PAD, bantuan Pemerintah Pusat dan pinjaman yang disajikan sebelumnya maka perhitungan Rasio Kemandirian pemerintah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017 - 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$2017 = \frac{\text{Rp. } 69.387.597.124,85}{\text{Rp. } 641.292.929.995,00 + \text{Rp. } 87.766.521.000,00} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. } 69.387.597.124,85}{\text{Rp. } 729.059.450.995} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0,0951 \text{ atau } 9,51\%}$$

$$2018 = \frac{\text{Rp. } 52.151.698.921,04}{\text{Rp. } 702.676.142.423,00 + \text{Rp. } 106.073.314.000,00} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. } 52.151.698.921,04}{\text{Rp. } 808.749.456.423} \times 100\%$$

= **0,0644 atau 6,44 %**

		Rp. 62.337.943.760,48	
2019	=	$\frac{\text{Rp. } 62.337.943.760,48}{\text{Rp. } 740.354.936.381,00 + \text{Rp. } 120.987.917.000,00}$	x100%
		Rp. 62.337.943.760,48	
	=	$\frac{\text{Rp. } 62.337.943.760,48}{\text{Rp. } 861.342.853.381}$	x 100%
	=	0,072 atau 7,2%	
		Rp. 50.953.585.078,20	
2020	=	$\frac{\text{Rp. } 50.953.585.078,20}{\text{Rp. } 723.282.363.424,00 + \text{Rp. } 120.170.204.412,00}$	x100%
		Rp. 50.953.585.078,20	
	=	$\frac{\text{Rp. } 50.953.585.078,20}{\text{Rp. } 843.452.567.836}$	x 100%
	=	0,060 atau 6.0 %	

Setelah di lakukan perhitungan dengan rumus kemandirian dapat diketahui nilai rasio Kemandirian dan interpretasi nilai Kemandirian kabupaten pohuwato pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 8 Kriteria Rasio Kemandirian

Presentase Kemandirian	Kriteria Kemandirian
0% - 25%	Sangat Rendah
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber: Abdul Halim (2012)

Tabel 4. 9 Kriteria Kemandirian Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020

Tahun	Rasio Kemandirian	Kriteria Kemampuan Keuangan
2017	9,51 %	Sangat Rendah
2018	6,44 %	Sangat rendah
2019	7,2 %	Sangat rendah
2020	6,0 %	Sangat rendah

4.2.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio ini di gunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari periode ke periode berikutnya. Dengan di ketahuinya pertumbuhan untuk masing - masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan ini mengukur Total PAD tahun akhir, kemudian di kurangi dengan Total PAD Tahun Sebelumnya lalu di bagi dengan Total PAD tahun sebelumnya.

Data penelitian LRA total PAD tahun akhir, Total PAD tahun sebelumnya kabupaten Pohuwato Tahun anggaran 2017 – 2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 10 Data Total Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah
2017	70.687.310.318,00
2018	60.636.332.336,00
2019	66.564.152.234,00
2020	74.201.375.007,00

Sumber Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan data Total Pendapatan Asli Daerah, yang di sajikan sebelumnya maka perhitungan Rasio Pertumbuhan pemerintah Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017 - 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} 2018 &= \frac{\text{Rp. } 60.636.332.336.000 - \text{Rp. } 70.687.310.318.00}{\text{Rp. } 70.687.310.318.00} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } -10.050.977.982}{\text{Rp. } 70.687.310.318.00} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= \mathbf{-14,21 \%}$$

$$\begin{aligned}
 2019 &= \frac{\text{Rp. } 66.564.152.234,00 - \text{Rp. } 60.636.332.336,00}{\text{Rp. } 60.636.332.336,00} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. } 5.927.819.898}{\text{Rp. } 60.636.332.336,00} \times 100\% \\
 &= \mathbf{9,77 \%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2020 &= \frac{\text{Rp. } 74.201.375.007,00 - \text{Rp. } 66.564.152.234,00}{\text{Rp. } 66.564.152.234,00} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. } 7.637.222.773}{\text{Rp. } 66.564.152.234,00} \times 100\% \\
 &= \mathbf{11,47 \%}
 \end{aligned}$$

Setelah di lakukan perhitungan dengan rumus Pertumbuhan dapat diketahui nilai rasio Pertumbuhan dan interpretasi nilai Pertumbuhan kabupaten pohuwato pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 11 kriteria Rasio Pertumbuhan

Presentase Pertumbuhan	Kriteria Pertumbuhan
0% - 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50% - 100%	Tinggi

Sumber : Abdul Halim (2012)

Tabel 4. 12 Kriteria Pertumbuhan Keuangan Kabupaten Pohuwato TA 2017 - 2020

Tahun	Rasio Pertumbuhan	Kriteria Kemampuan Keuangan
2018	-14,21 %	Rendah
2019	9,77 %	Rendah
2020	11,47 %	Rendah

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dilihat Dari Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka tingkat Efektivitas PAD Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2017-2020 di uraikan sebagai berikut.

Pada tahun 2017, Rasio Efektifitas Kabupaten Pohuwato sebesar 98,16 %. Tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato apabila dilihat berdasarkan Rasio Efektivitas PAD tergolong dalam kriteria Efektif. Karena berada dalam kisaran 90 -100 %. Namun meskipun sudah tergolong Efektif, Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 hanya sekitar Rp. 69.387.597.124,85. Itu artinya untuk PAD yang telah ditetapkan Pemda Kabupaten Pohuwato masih memiliki selisih kurang dana Realisasi sebesar Rp. 1.299.713.193,15.

Pada tahun 2018 Rasio Efektifitas Kabupaten Pohuwato mengalami penurunan sebesar 0,86 % dari tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 86,01 %. Dalam hal ini kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato apabila dilihat dari kriteria Efektivitas termasuk dalam kriteria Cukup Efektif. Karena berada dalam kisaran 80 -90 %. Hal tersebut menggambarkan pencapaian PAD pada tahun 2018 belum dapat mencapai target. Karena Realisasi PAD pada tahun 2018 hanya berkisar sebesar Rp. 52.151.698.921,04. Sedangkan Target yang di tetapkan sebesar Rp. 60.636.332.336,00. Dengan demikian untuk dapat mencapai target PAD yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih memiliki selisih kekurangan dana Realisasi sebesar Rp. 8.120.633.414,96. Dan untuk realisasi

PAD tahun 2018 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Begitupun dengan anggaran PAD yang di tetapkan apabila di bandingkan dengan tahun 2017 yang juga mengalami penurunan.

Pada tahun 2019, Rasio Efektivitas Kabupaten Pohuwato terjadi sedikit peningkatan Sebesar 0,93 % dari tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 93,65 %. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pohuwato apabila dilihat berdasarkan Rasio Efektivitas PAD tergolong dalam kriteria Efektif. Karena berada pada kisaran angka 90 -100 %. Namun meskipun terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian PAD Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 belum ada pada target. Hal ini ditunjukan Realisasi Penerimaan PAD pada tahun 2019 hanya sebesar Rp. 62.337.943.760,48. Sedangkan Target PAD yang di tetapkan adalah sebesar Rp.66.564.152.234,00. Dalam artian Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih memiliki selisih kekurangan dana Realisasi sebesar Rp. 4.226.208.473,52 sehingga dapat mencapai target PAD yang di tetapkan.

Pada tahun 2020, Rasio Efektifitas Kabupaten Pohuwato terjadi penurunan sebesar 0,68 % dari tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 68,67 %. Dalam hal ini kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pohuwato apabila dilihat dari Rasio Efektivitas termasuk dalam kriteria Kurang Efektif. Karena berada dalam kisaran 60 - 80 %. Hal tersebut menggambarkan pencapaian PAD pada tahun 2020 belum dapat mencapai target. Karena Realisasi PAD pada tahun 2020 hanya berkisar sebesar Rp. 50.953.585.078,00. Sedangkan Target yang di tetapkan sebesar Rp. 74.201.375.007,00. Itu artinya Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih memiliki

selisih kurang dana sebesar Rp. 23.347.789.929 atau lebih untuk bisa mencapai target PAD yang telah di tetapkan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektifitas Kabupaten Pohuwato mengalami fluktuasi atau naik turunnya nilai suatu Kinerja Pemerintah Daerah. PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menjadi tidak stabil. Tahun 2017 Efektif, Tahun 2018 cukup Efektif, kemudian di Tahun 2019 naik sehingga dikategorikan Efektif, dan di Tahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga berada pada kategori kurang Efektif. Realisasi PAD Kabupaten Pohuwato untuk tahun anggaran 2017-2020 belum dapat mencapai target. Ini disebabkan karena menurut Narasumber tingkat kepatuhan Masyarakat sebagai pihak yang membayar pajak dan retribusi Daerah masih rendah. Selain itu, penyebabnya juga karena masih adanya pengusaha yang sudah memungut pajak Daerah tetapi tidak menyetorkan secara benar terhadap hasil pemungutan pajak yang sudah ditagihkan pada konsumen/masyarakat. Dan dalam hal ini juga belum adanya sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya baik sebagai pemungut maupun sebagai pembayar pajak. Dan untuk Tahun 2020 sendiri Realisasi PAD apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terbilang sangat rendah dalam hal ini masih sangat jauh untuk dapat mencapai target yang di tetapkan. Ini dikarenakan adanya pengurangan atau pembebasan dana, penundaan pajak, dan retribusi Daerah selama tiga bulan. Karena dampak ekonomi akibat covid19.

Namun meskipun demikian, PEMDA Kabupaten Pohuwato masih terus melakukan upaya-upaya sehingga Realisasi PAD bisa dapat mencapai atau melampaui target upaya tersebut adalah dengan terus mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan pajak Daerah yang ada, dan terus melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, melakukan sistem jemput bola dalam penagihan pajak hotel dan restoran.

Adapun upaya PEMDA Pohuwato lainnya ialah menerapkan sistem aplikasi terhadap PAD dengan melaksanakan penerapan sistem aplikasi terhadap pemungutan pajak Daerah. Dalam hal ini diadakannya perjanjian kerjasama antara PEMDA dengan Banksulutgo untuk pemasangan alat perekam transaksi online pada pelaku usaha, Hotel, Dan Restoran. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jumlah transaksi pada restoran, rumah makan, dan hotel.

PEMDA Pohuwato juga menerapkan sistem aplikasi Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) online yang terhubung atau terintegrasi dengan data kantor perusahaan, dan juga merencanakan program kegiatan reklasifikasi terhadap NJOP PBB yang saat ini masih menggunakan nilai jual objek (NJOP) bawaan dari kantor KPP Pratama.

Adapun penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang di teliti oleh Anim Rahmayati (2016) dengan judul penelitian *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2013”* dengan menggunakan metode penelitian Deskritif. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang di peroleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dan menggunakan metode

pengukuran Rasio keuangan. Namun pada Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo apabila di lihat dari rasio efektifitas berbeda dengan hasil kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Tingkat Efektivitas Kabupaten Sukoharjo berada di atas presentase rata – rata sudah di atas 100% sehingga dapat di kategorikan sangat Efektif. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat optimal apabila di lihat dari segi Rasio Efektivitas. Dalam artian pemerintah Kabupaten Pohuwato mampu merealisasikan dengan optimal anggaran Pendapatan Asli Daerahnya sehingga bisa mencapai, bahkan bisa melampaui target PAD yang sudah di tetapkan.

4.3.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dilihat Dari Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tingkat Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017-2020 dapat diurakan sebagai berikut.

Pada tahun 2017, Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 4,32%. Kinerja keuangan Kabupaten Pohuwato berdasarkan Efisiensi PAD pada tahun ini tergolong sangat Efisien, karena berada pada kisaran dibawah 60%. Kriteria sangat Efisien tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Pohuwato berhasil menekan biaya yang dikeluarkan. Biaya pemungutan PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000 atau 4,32% dari total PAD yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 69.387.597.124,85.

Pada tahun 2018, Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 11,55%. meskipun pada tahun ini biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD terbilang lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun kinerja keuangan PEMDA Kabupaten Pohuwato jika dilihat berdasarkan kriteria rasio Efisiensi masih tetap tergolong sangat Efisien karena berada pada kisaran dibawah 60%. Dalam hal ini menunjukan bahwa PEMDA Pohuwato masih tetap konsisten dengan terus menekan biaya yang dikeluarkan. Biaya pemungutan PAD pada tahun 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000 atau 11,50% dari total PAD yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 52.151.698.921,04.

Pada tahun 2019, Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 11,22%. Pada tahun ini biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD kembali sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Namun meskipun demikian kinerja keuangan PEMDA Pohuwato masih tetap tergolong dalam kriteria sangat Efisien. Karena rasio Efisiensi PAD masih tetap berada dalam kisaran dibawah 60%. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.000.000.000 atau sekitar 11,22% dari total PAD yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 62.337.943.760,48.

Pada tahun 2020, Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 0% atau tidak terdapat biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD. Karena memang pada tahun 2020 tidak terdapat adanya belanja modal yang dikeluarkan untuk memungut PAD. Hal ini di sebabkan karena dampak dari pandemi covid-19 yang mengharuskan PEMDA Pohuwato lebih memfokuskan anggaran PAD yang ada untuk digunakan dalam penanganan pandemi covid-19.

Pada tahun 2020 sendiri untuk pungutan PAD hanya terdapat pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat Efisiensi Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017-2020 sangat baik. karena untuk biaya yang dikeluarkan pada pungutan PAD selalu berada dibawah atau tidak pernah melampaui realisasi PAD yang ada. Kriteria rasio Efisiensi selalu konsisten pada kisaran dibawah 60%. Itu artinya upaya PEMDA Pohuwato dalam menekan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD terbilang sukses. Hal ini juga membuktikan keberhasilan PEMDA Pohuwato dalam upaya menerapkan sistem pengawasan secara kontinyu untuk kepentingan program-program yang bertujuan dalam menstabilkan PAD Kabupaten Pohuwato.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Ketut Erna Rahmawati (2016) dalam judul “Analisis Kinerja Keuangan PEMDA Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012” dengan menggunakan metode kualitatif yang di dalam penelitiannya untuk Rasio Efisiensi Kabupaten sumbawa setelah dilakukan pengukuran menggunakan Rasio Efisiensi berada pada presentase rata-rata diatas 100% sehingga berada pada kategori tidak efisien. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten sumbawa untuk tingkat Rasio Efisiensi masih belum optimal dan membuktikan bahwa biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD masih jauh lebih besar atau belum bisa seimbang dengan realisasi penerimaan PAD. Berbeda dengan kabupaten Kabupaten Pohuwato untuk tingkat Efisisensi sudah bisa dikategorikan baik. hal ini ditunjukan pada tingkat presentase Rasio Efisiensi untuk Empat tahun terakhir

berada pada presentase dibawah 60% sehingga berada pada kategori kriteria sangat efisien. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD terbilang sedikit atau kecil dibandingkan realisasi penerimaan PAD.

4.3.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dilihat Dari Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka tingkat kemandirian Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2017-2020 diuraikan sebagai berikut.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir mula dari tahun 2017-2020, Rasio keuangan Kabupaten Pohuwato hanya berada pada kisaran 0-25%. Sehingga berada pada kategori sangat rendah. Pada tahun 2017 Rasio Kemandirian Kabupaten Pohuwato setelah dilakukan pengukuran adalah sebesar 9,51%. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2017 adalah sebesar 70.687.310.318,00 dan yang terealisasi sebesar 69.387.597.124,85. Adapun pendapatan tranfer dari pemerintah pusat untuk anggrannya sendiri adalah sebesar 652.636.066.000,00 dan yang terealisasi hanyalah sebesar 641.292.929.981,00. Serta untuk anggaran transfer pusat lainnya sebesar 87.766.521.000,00 yang terealisasi adalah sebesar 87.766.521.000,00. Dari uruaian diatas maka diketahui untuk Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 masih tergolong kecil. Terlebih apabila dilihat pada Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan masih terbilang kecil untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pohuwato sendiri. Dalam hal ini yang berpengaruh besar pada Pendapatan Asli Daerah tahun

2017 hanya pada PAD lain-lain yang sah yaitu sebesar 52.001.749.485,00. Dengan jumlah realisasi sebesar 52.507.056.401,85. Dan untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat masih tergolong besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Kemudian pada tahun 2018 Rasio Kemandirian Kabupaten Pohuwato setelah dilakukan pengukuran adalah sebesar 6,44%. Dalam hal ini apabila dibandingkan dengan Rasio Kemandirian pada tahun 2017 terjadi penurunan sehingga masih tetap berada pada kategori sangat rendah. Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 60.636.332.336,00. Pendapatan Asli Daerah dihasilkan dari pajak Daerah dengan anggarannya sebesar 9.291.490.833,00. Untuk Pendapatan pajak Daerah terbilang meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 8.916.490.833,00. Kemudian Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar 8.219.670.000,00. Serta Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebesar 3.095.980.220,00. Dan yang paling berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pada Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah yaitu sebesar 40.029.191.283,00. Dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi hanya sebesar 52.151.698.521,04. Dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat serta dana penyesuaian masih tergolong besar apabila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah pusat adalah sebesar 652.636.066.000,00. Serta dana penyesuaian adalah sebesar 87.766.521.000,00. Sehingga apabila ditotalkan sebesar 740.402.587.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar 808.749.456.423,00.

Pada tahun 2019 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Pohuwato setelah dilakukan pengukuran adalah sebesar 7,23%. Dengan demikian tingkat presantase tahun 2019 meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya berada pada presentase 6,44%. Namun dalam hal ini Rasio Kemandirian pada tahun 2019 masih tetap tergolong dalam kategori kriteria sangat rendah sama dengan pada tahun 2017 dan 2018. Pendpatan Asli Dearah pada tahun 2019 adalah sebesar 66.564.152.234,00. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun sebelumnya maka terjadi sedikit peningkatan pada tahun ini. Hal ini dapat dilihat pada pendapatan pajak daerah yang meningkat menjadi 10.977.490.833,00. Setelah ditahun sebelumnya yang hanya sebesar 9.291.490.833,00. Dan angka realisasi untuk Pendaptan pajak Daerah tahun 2019 memiliki selisih sebesar 1.328.711.591,00. Adapaun Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar 5.142.603.200,00. Namun pada pendapatan retribusi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato hanya mampu merealisasikan sebesar 5.593.069.349,00 sehingga masih memiliki selisih sebesar 3.549.533.851,00. Untuk Pendapatan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 3.685.000.000,00. Denga jumlah realisasi sebesar 3.685.307.703,00. Dan Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya adalah sebesar 42.759.058.201,00. Dengan jumlah realisasi sebesar 43.410.787.466,48. Sehingga dapat ditotalkan untuk Pendaptan Asli Daerah tahun 2019 adalah sebesar 66.564.152.234,00 dan total keseluruhan PAD yang terealisasi adalah sebesar 62.337.943.760,48. Adapun pendpaatan transfer pemerintah pusat di tahun 2019 adalah sebesar 758.384.805.900,00. Dengan realisasinya sebesar 740.354.936.381,00. Dan

pendapatan transfer pusat lainnya adalah sebesar 120.587.517.000,00. Dengan jumlah realisasi sebesar 120.987.917.000,00. Maka dapat ditotalkan untuk keseluruhan pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar 879.372.722.900,00. Dan total realisasi yaitu sebesar 861.342.853.381,00. Dalam hal ini terjadi peningkatan dana transfer pusat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2020 Rasio Kemandirian Kabupaten Pohuwato setelah dilakukan pengukuran adalah sebesar 6,04%. Kembali terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki presentase sebesar 7,23%. Sehingga masih tetap tergolong dalam kriteria sangat rendah. Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 adalah sebesar 74.201.375.007,00. Dengan jumlah realisasi sebesar 50.953.585.078,20. Dan untuk Pendapatan Pajak Daerah ditahun ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 10.977.490.833,00. Pendapatan Pajak Daerah ditahun ini adalah sebesar 11.143.760.798,00. Akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato hanya mampu merealisasikan sebesar 8.244.259.730,00. Sehingga masih memiliki selisih sebesar 2.899.501.068,00. Selisih realisasi ditahun ini terbilang besar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1.328.711.591,00. Pendapatan Retribusi Daerah adaah sebesar 7.467.727.000,00. Dengan realisasi yang hanya sebesar 3.974.757.033,00. Pendapatan hasil penegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 3.800.000.000,00. Dengan realisasinya sebesar 2.200.994.050,00. Dan untuk Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah ditahun ini masih tetap menjadi sumber yang

berpengaruh besar pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pohuwato sendiri dengan total pendapatannya sebesar 51.789.887.209,00 dengan realisasinya sebesar 36.533.574.265,20. Adapun pendapatan transfer pusat ditahun 2020 yaitu sebesar 730.575.882.000,00 dengan realisasinya sebesar 723.282.363.424,00. Dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang diambil dari dana penyesuaian adalah sebesar 120.319.701.000,00 dengan realisasinya sebesar 120.170.204.412,00. Apabila ditotalkan maka anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2020 kurang lebihnya adalah sebesar 850.895.583.000,00 dan total realisasinya adalah sebesar 843.452.567.836,00.

Berdasarkan pembahasan di atas dengan ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih bergantung atau masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar pada Pemerintah Pusat. Dan belum mampu mencukupi kebutuhan Daerahnya sendiri. Hal ini disebabkan karna potensi-potensi penerimaan asli daerah yang dimiliki Pohuwato masih belum maksimal pemungutannya dan juga masih tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat. Perusahaan-perusahaan memang sangat banyak tersebar di Indonesia, dan transaksi-transaksi penjualan juga banyak terjadi di Derah-daerah di Indonesia. Namun, setiap penerimaan pajaknya hanya merupakan pajak Pemerintah Pusat. Sedangkan pajak Daerah sebenarnya jumlahnya cukup beragam, akan tetapi yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan hanyalah sedikit, misalkan pajak hotel dan pajak restoran.

Pemerintah Daerah sendiri dibatasi ruangnya untuk mengkreasikan sumber-sumber penerimaan atau memperluas basis penerimaan dengan hanya berdasarkan apa yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yakni tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah. Hal tersebut membatasi anggaran Pemerintah Daerah untuk membiayai seluruh pengeluarannya. Khususnya pada Daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam. Melihat hal tersebut PEMDA Pohuwato mengadakan upaya perbaikan formulasi kebijakan dibidang pendapatan Daerah melalui pengembangan pajak dan retribusi Daerah yang harmonis dengan pajak pusat agar menjadi signifikan untuk dijadikan andalan pendapatan Daerah.

Adapun dalam penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Anim Rahmawati (2016) terkait dengan judul “Pengukuran Kinerja Keuangan” yang juga melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif, memiliki tingkat kemandirian yang sama dengan Kabupaten Pohuwato, yaitu berada pada kriteria sangat rendah. Rasio kemandirian Kabupaten Sukoharjo terbilang sangat rendah karna hanya berada pada presentase rata-rata dibawa 25%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal terutama dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

Setelah dilakukan perbandingan, hal ini menunjukan bahwa untuk menjadi suatu Daerah yang tingkat kemandirianya sudah tercapai memang terbilang sulit hal ini diperkuat dengan banyaknya penelitian terdahulu terkait pengukuran kinerja keuangan diberbagai Daerah yang menunjukan rasio kemandirian rata-rata hanya berada pada kriteria sangat rendah.

4.3.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dilihat Dari Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tingkat Pertumbuhan Kabupaten Pohuwato untuk tahun anggaran 2017-2020 diuraikan sebagai berikut.

Rasio Pertumbuhan Kabupaten Pohuwato pada tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2018-2020 mengalami pertumbuhan yang negatif. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Pohuwato hanya berada pada kisaran 0%-25%. Sehingga hanya berada pada kategori Rendah.

Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Pohuwato pada tahun 2018 adalah sebesar 14,21%, pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 9,77%, dan pada tahun 2020 juga kembali meningkat menjadi sebesar 11,47%. Namun meskipun terjadi peningkatan tiap tahunnya hal ini tetap saja menyebabkan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Pohuwato tetap berada pada kategori Rendah. Total PAD Kabupaten Pohuwato mengalami fluktuasi hal ini ditunjukan pada tahun 2017 adalah sebesar 70.687.332.366,00 dan pada tahun 2018 turun menjadi 60.636.332.366,00 lalu pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi sebesar 66.564.152.234,00 dan pada tahun 2020 juga kembali meningkat yakni sebesar 74.201.375.007,00.

Pertumbuhan PAD Kabupaten Pohuwato tergolong dalam kategori Rendah, karena adanya banyak permasalahan sehingga menghambat penerimaan Asli Daerah, antara lain adalah tingkat kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak dan retribusi Daerah masih rendah. Demikian juga dengan para pengusaha

yang sudah memungut pajak Daerah tetapi tidak menyetorkan secara benar. Dan mengingat hal tersebut, PEMDA Pohuwato mengupayakan berbagai macam cara agar supaya tingkat kepatuhan pelaku usaha wajib pungut pajak dan wajib retribusi Daerah menjadi semakin meningkat. Upaya tersebut antara lain adalah dengan mengadakan program percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah. Dengan tujuan semua pemungut pajak dan retribusi daerah nantinya akan di digitalisasi melalui aplikasi dompet digital atau e-money dan bekerja sama dengan PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) dan perbankan. Sehingga pembayar pajak dan retribusi dapat lebih mudah efektif dan efisien serta dapat mengurangi kebocoran-kebocoran penerimaan Daerah yang bisa saja dilakukan oleh oknom-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dalam penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Erna Rahmawati (2016) dalam judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012. Dalam penelitian ini tingkat rasio pertumbuhan terbilang sama dengan tingkat rasio pertumbuhan pada Kabupaten Phuwato yang hanya berada pada kriteria Rendah. Presentase rasio pertumbuhan Kabupaten Sumbawa rata-rata sebesar 13,46%, dan presentase Rasio Pertumbuhan Kabupaten Pohuwato hanya berkisar rata-rata dibawah 25%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Pohuwato mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 berada pada kriteria efektif, tahun 2018 cukup efektif, 2019 kembali efektif dan di tahun 2020 Kriteria rasio effektifitas Kabupaten Pohuwato Turun menjadi kurang efektif.
2. Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Pohuwato dari tahun 2017 – 2020 tergolong sangat Efisien. Karena memiliki presentase Rata -Rata di bawah 60 %.
3. Rasio Kemandirian PAD Kab Puhuwato tahun 2017-2020 tergolong sangat rendah. Karena hanya berada pada presentase rata-rata di bawah 25%.
4. Rasio Pertumbuhan PAD kab. Pohuwato tergolong Rendah. Hanya dengan presentase rata-rata di bawah 25%

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Periode penelitian ini relatif pendek sehingga jumlah data yang di teliti menjadi sedikit.
2. Menggunakan data sekunder atau data yang sudah terlebih dahulu di buat sehingga tidak bisa di kembangkan lebih luas.
3. Data yang di gunakan dalam penelitian ini hanya sebatas merujuk pada laporan realisasi APBD yang berformat standar akuntansi pemerintah (SAP).

5.3 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Badan keuangan Daerah Kab Pohuwato di harapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengolahan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Asli Daerah .
2. Bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, di harapkan untuk supaya bisa menggunakan lebih banyak lagi rasio sehingga hasil penelitiannya bisa lebih akurat. Selain itu di harapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anim R, (2016). *analisis kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten sukoharjo tahun anggaran 2011-2013*. 1(1)
- Arja S 2000, *Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan*. 2 (2):138-150
- Asmara I m, 2017. *Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan studi pada inspektorat dan BPKD kota bandung*, thesis.
- Ayu n s, *analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten simalungun tahun 2012-2013*, thesis.
- Dri A, 2020. *Dimensi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. 5(1):1-10
- Halim,A. edisi revisi 2007. *Akuntansi dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Ibrahim, i. 2017. *Pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kinerja organisasi publik pada rumah sakit umum daerah syekh yusuf kabupaten gowa*. Akmen jurnal ilmiah. 14 (3)
- John f, “*Pengaruh tingkat Pendidikan, masa kerja, pelatihan dan jabatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan*”. 179.
- Joko p, “*Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah*”(studi kasus pada pemda kota Surakarta).
- Mr m, 2016. “*Kinerja keuangan pemerintah daerah*.”
- Muchlisisn r. (2020), *Pengukuran kinerja,pengertian,tujuan,syarat,model dan proses*.
- Muh m g, 2017. “*Analisis kinerja anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten marowali pada periode 2011-2015*”. 3 (1)
- Muhamad Z, 2016. “*Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kaur*”. 4 (2).
- Ni ketut e r, 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012*. 15 (3): 1767-1795
- Niken n. (2020). *Desentralisasi politik dalam ranah otonomi daerah*. 6 (2)

Ni made a e, *Analisis kinerja Kawasan metropolitan.*

Ratmono, D, Sholihin M. edisi kedua 2017. *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Ratri M. 2009. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Pada Pemda Kabupaten Sukoharjo Periode 2005-2007).* skripsi:1-7

Ruwanda Z. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera.* skripsi: 1-15

Salomi j. 2015. *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota ambon.* 2 (1) : 34

Utami D. *Akuntansi sektor publik.*

Wiwik Andriani. 2015. *Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) dalam mewujudkan good governance pada politeknik negeri padang.* 10 (2):51-60.

Wahyu L. 2017. *Analisis penilaian kinerja pegawai pada balai Teknik penyehatan lingkungan pemukiman Surabaya.* 6 (1):1-9

Yuesti A, Dewi S P L N, Pramesti A A I. cetakan pertama tahun 2020. *Akuntansi sektor publik.*

LAMPIRAN 1 Dokumentasi











**PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Kompleks Blok Plan Kec. Marisa Telp. (0443) 210484

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pohuwato Menerangkan Bawa Sesungguhnya Saudara/I :

Nama : Siti Winda Purnama Laima
NIM : E.11.18.089
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas : Ekonomi
Prodi : Akuntansi
Keterangan : Telah Melakukan Penelitian Dengan
Menggunakan Secara Deskritif.

Mahasiswa Tersebut Benar-benar Melakukan Kegiatan di Badan Keuangan Daerah pada tanggal 23 September 2021 dengan judul **“Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Pohuwato, 23 september 2021





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3528/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Siti Winda Purnama Laima

NIM : E1118089

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)
KABUPATEN POHuwATO

Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POHuwATO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN POHUVATO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
4	PENDAPATAN - LRA	834.555.268.718,00	822.135.259.819,85	98,51	862.253.451.273,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	70.687.310.318,00	69.387.597.124,85	98,16	62.981.898.282,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	8.916.490.833,00	8.273.524.614,00	92,79	25.779.757.034,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.469.070.000,00	6.633.108.218,00	78,32	5.201.268.351,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1.300.000.000,00	1.973.907.891,00	151,84	1.282.031.893,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	52.001.749.485,00	52.507.056.401,85	100,97	30.718.841.004,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	759.843.587.000,00	749.382.289.995,00	98,62	793.295.660.641,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	652.636.066.000,00	641.292.929.981,00	98,26	704.826.855.692,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	11.138.236.000,00	8.885.155.073,00	79,77	11.664.491.934,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	6.451.085.000,00	3.995.317.699,00	61,95	3.160.361.946,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	512.143.752.000,00	512.143.752.000,00	100,00	521.261.079.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	26.511.126.000,00	25.611.247.377,00	96,61	168.740.922.812,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan - LRA	38.695.302.000,00	38.425.937.900,00	99,30	0,00
4.2.1.6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LRA	6.354.343.000,00	6.305.185.051,00	99,23	0,00
4.2.1.7	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	51.342.222.000,00	45.925.334.881,00	89,45	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	87.766.521.000,00	87.766.521.000,00	100,00	68.150.002.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	87.766.521.000,00	87.766.521.000,00	100,00	68.150.002.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	18.575.000.000,00	18.576.331.814,00	100,01	17.871.721.149,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	18.575.000.000,00	18.576.331.814,00	100,01	17.871.721.149,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	866.000.000,00	1.746.507.200,00	201,68	2.447.081.800,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	866.000.000,00	1.746.507.200,00	201,68	2.447.081.800,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	4.024.371.400,00	3.365.372.700,00	83,62	5.975.892.350,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	4.024.371.400,00	3.365.372.700,00	83,62	5.975.892.350,00
5	BELANJA	748.554.306.367,00	701.558.710.677,84	93,72	709.900.754.950,00
5.1	BELANJA OPERASI	586.886.867.477,00	548.275.121.561,84	93,42	519.774.151.310,00
5.1.1	Belanja Pegawai	312.216.082.000,00	293.030.494.775,00	93,86	325.773.712.024,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.477.539.477,00	230.470.177.786,84	92,75	177.072.381.786,80
5.1.5	Belanja Hibah	18.673.346.000,00	18.340.655.000,00	98,22	11.217.222.500,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.519.900.000,00	6.433.794.000,00	85,56	5.710.835.000,00
5.2	BELANJA MODAL	160.867.438.890,00	152.860.739.116,00	95,02	190.126.603.640,00
5.2.1	Belanja Modal Tambah	6.797.250.000,00	5.638.687.880,00	82,96	8.272.549.407,00



NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.769.791.765,00	29.193.002.960,00	91,89	39.008.171.617,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.448.106.812,00	37.088.207.853,00	96,46	41.394.007.944,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.790.241.751,00	77.385.092.051,00	96,99	98.816.071.312,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.062.048.562,00	3.555.748.372,00	87,54	2.635.803.360,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	800.000.000,00	422.850.000,00	52,86	0,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	800.000.000,00	422.850.000,00	52,86	0,00
6	TRANSFER	151.197.292.523,00	150.391.001.754,00	99,47	124.339.049.483,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.738.556.083,00	1.688.556.084,00	97,12	1.434.304.503,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	891.649.083,00	841.649.084,00	94,39	743.358.203,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	846.907.000,00	846.907.000,00	100,00	690.946.300,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	149.458.736.440,00	148.702.445.670,00	99,49	122.904.744.980,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	148.691.001.000,00	147.934.710.230,00	99,49	122.028.052.100,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	767.735.440,00	767.735.440,00	100,00	876.692.080,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.196.330.172,00)	(29.814.452.611,99)	45,73	28.013.646.839,20
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.196.330.172,00	68.301.564.039,43	100,15	47.182.683.333,23
7.1.1	Penggunaan SILPA	68.196.330.172,00	68.250.367.774,43	100,08	47.182.683.333,23
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	51.196.265,00	0,00	0,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
7.2.2	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	65.196.330.172,00	65.301.564.039,43	100,16	40.182.683.333,23
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	35.487.111.427,44	0,00	68.196.330.172,43

Marisa, 1 Januari 2017

BUPATI

SYARIF MBUINGA



PEMERINTAH KABUPATEN POHUVATO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4	PENDAPATAN - LRA	924.910.297.080,40	904.691.929.792,04	97,81	822.135.259.819,85
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	60.636.332.335,00	52.151.698.921,04	86,01	69.387.597.124,85
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	9.291.490.833,00	8.880.247.117,00	95,57	8.273.524.614,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.219.670.000,00	5.322.895.756,00	64,76	6.633.108.218,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.095.980.220,00	3.095.980.220,00	100,00	1.973.907.891,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	40.029.191.283,00	34.852.575.828,04	87,07	52.507.056.401,85
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	839.032.271.000,00	828.345.870.871,00	98,73	749.382.289.995,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	711.185.232.000,00	702.676.142.423,00	98,80	641.292.929.981,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	10.389.302.000,00	9.212.021.992,00	88,67	8.885.155.073,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.658.341.000,00	1.715.590.579,00	64,54	3.996.317.699,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	513.389.155.000,00	513.389.155.000,00	100,00	512.143.752.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	46.201.272.000,00	43.385.293.362,00	93,90	25.611.247.377,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan - LRA	49.027.000.000,00	50.040.434.100,00	102,07	38.425.937.900,00
4.2.1.6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LRA	28.830.000.000,00	27.961.587.044,00	96,99	6.305.185.051,00
4.2.1.7	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisk - LRA	60.690.162.000,00	56.972.059.946,00	93,87	45.925.334.881,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	106.147.039.000,00	106.073.314.000,00	99,93	87.766.521.000,00
4.2.2.1	Dana Penyesuaian - LRA	106.147.039.000,00	106.073.314.000,00	99,93	87.766.521.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	21.700.000.000,00	19.596.414.448,00	90,31	18.576.331.814,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	21.700.000.000,00	19.596.414.448,00	90,31	18.576.331.814,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	1.746.507.200,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari <u>Provinsi</u> - Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	1.746.507.200,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	25.271.693.744,40	24.194.360.000,00	95,74	3.365.372.700,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	25.271.693.744,40	24.194.360.000,00	95,74	3.365.372.700,00
5	BELANJA	808.702.870.694,84	758.514.064.354,45	93,79	701.558.710.677,84
5.1	BELANJA OPERASI	625.329.568.629,92	589.518.318.632,45	94,27	548.275.121.561,84
5.1.1	Belanja Pegawai	317.143.155.941,38	308.211.847.599,00	97,18	293.030.494.775,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	282.550.797.688,54	256.420.301.073,45	90,75	230.470.177.736,84
5.1.5	Belanja Hibah	17.063.565.000,00	16.782.600.000,00	98,35	18.340.655.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.572.050.000,00	8.103.570.000,00	94,53	6.433.791.000,00
5.2	BELANJA MODAL	182.523.302.054,92	168.925.745.722,00	92,55	152.860.739.116,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	6.618.250.000,00	2.027.268.830,00	30,63	5.638.687.880,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.122.103.254,00	32.022.337.174,00	93,85	29.193.002.960,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.471.648.644,00	35.113.132.673,00	88,96	37.088.207.853,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.311.477.258,92	95.224.737.858,00	97,86	77.385.092.051,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.999.822.893,00	4.538.269.187,00	90,77	3.555.748.372,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	850.000.000,00	70.000.000,00	8,24	422.850.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	850.000.000,00	70.000.000,00	8,24	422.850.000,00
6	TRANSFER	145.724.537.823,00	145.498.773.487,00	99,85	150.391.001.754,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.751.116.083,00	1.751.116.083,00	100,00	1.688.556.084,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	929.149.083,00	929.149.083,00	100,00	841.649.084,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	821.967.000,00	821.967.000,00	100,00	846.907.000,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	143.973.421.740,00	143.347.657.404,00	99,84	148.702.445.570,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	143.205.686.300,00	142.979.921.964,00	99,84	147.934.710.230,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	767.735.440,00	767.735.440,00	100,00	767.735.440,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.487.111.427,44)	679.091.950,59	(2,30)	(29.814.452.611,99)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.487.111.427,44	35.463.921.427,44	99,93	68.301.564.039,43
7.1.1	Penggunaan SILPA	35.487.111.427,44	35.462.471.427,44	99,93	68.250.367.774,43
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	1.450.000,00	0,00	51.196.265,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
7.2.2	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.487.111.427,44	29.463.921.427,44	99,92	65.301.564.039,43
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	30.143.013.378,03	0,00	35.487.111.427,44

Marisa, 31 Desember 2018

BUPATI

SYARIF MBUINGA



PEMERINTAH KABUPATEN POHUVATO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
1	PENDAPATAN - LRA	995.284.671.188,00	970.534.277.246,48	97,42	904.691.929.792,04
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	66.564.152.234,00	62.337.943.760,48	93,65	52.151.698.921,04
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	10.977.490.833,00	9.648.779.242,00	87,90	8.880.247.117,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.142.603.200,00	5.593.069.349,00	61,18	5.322.895.756,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.685.000.000,00	3.685.307.703,00	100,01	3.095.980.220,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	42.759.058.201,00	43.410.787.466,48	101,52	34.852.575.828,04
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	902.601.434.104,00	880.890.770.953,00	97,59	828.315.870.871,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	758.384.805.900,00	740.354.936.381,00	97,62	702.676.142.423,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	10.086.823.900,00	6.817.818.500,00	67,59	9.212.021.932,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.176.064.000,00	1.376.932.105,00	63,28	1.715.590.579,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	529.422.948.000,00	529.422.948.000,00	100,00	513.389.155.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	84.703.266.000,00	80.297.640.386,00	94,80	43.385.293.362,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan - LRA	24.468.307.000,00	23.978.463.479,00	98,00	50.010.434.100,00
4.2.1.6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LRA	39.238.567.000,00	38.588.134.213,00	98,34	27.961.507.444,00
4.2.1.7	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	68.288.830.000,00	59.872.999.698,00	87,68	56.972.059.946,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	120.987.917.000,00	120.987.917.000,00	100,00	106.073.314.000,00
4.2.2.1	Dana Penyesuaian - LRA	120.987.917.000,00	120.987.917.000,00	100,00	106.073.314.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	23.228.711.204,00	19.547.917.572,00	84,15	19.596.414.448,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	23.228.711.204,00	19.547.917.572,00	84,15	19.596.414.448,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	27.119.084.850,00	27.305.562.533,00	100,69	24.194.360.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	27.119.084.850,00	27.305.562.533,00	100,69	24.194.360.000,00
5	BELANJA	865.037.328.039,00	827.465.026.349,56	95,66	758.514.064.354,45
5.1	BELANJA OPERASI	665.480.989.757,00	638.160.941.589,19	95,89	589.518.318.632,45
5.1.1	Belanja Pegawai	335.740.398.607,00	331.052.664.590,00	98,60	308.211.847.559,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	301.828.521.150,00	279.675.756.999,19	92,66	256.420.301.073,45
5.1.5	Belanja Hibah	20.564.970.000,00	20.223.970.000,00	98,34	16.782.600.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.347.100.000,00	7.208.550.000,00	98,11	8.103.570.000,00
5.2	BELANJA MODAL	199.116.338.282,00	188.879.484.760,37	94,86	168.925.745.722,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.505.000.000,00	1.603.680.719,00	64,02	2.027.268.829,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.510.133.446,00	52.702.519.930,00	93,26	32.022.337.174,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.079.210.741,00	60.536.085.286,69	94,47	35.113.132.673,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.613.409.293,00	67.994.886.786,68	97,67	95.224.737.858,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.408.594.003,00	6.042.302.038,00	94,28	4.538.269.187,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	440.000.000,00	424.600.000,00	96,50	70.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	440.000.000,00	424.600.000,00	96,50	70.000.000,00
6	TRANSFER	154.387.233.080,00	153.435.034.516,00	99,38	145.498.773.487,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.012.009.403,00	2.012.009.403,00	100,00	1.751.116.083,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.097.749.083,00	1.097.749.083,00	100,00	929.149.083,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	914.260.320,00	914.260.320,00	100,00	821.967.000,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	152.375.223.677,00	151.423.029.113,00	99,38	143.747.657.404,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	151.599.339.302,00	150.647.140.742,00	99,37	142.979.921.961,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	775.884.375,00	775.884.371,00	100,00	767.735.440,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.139.889.931,00)	(10.365.783.619,08)	44,80	679.091.950,59
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.139.889.931,00	30.143.013.378,03	100,01	35.463.921.427,44
7.1.1	Penggunaan SILPA	30.139.889.931,00	30.143.013.378,03	100,01	35.463.921.427,44
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
7.2	PENGELOUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
7.2.2	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	23.139.889.931,00	23.143.013.378,03	100,01	29.463.921.427,44
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	12.777.229.758,95	0,00	30.143.013.378,03

Marisa, 1 Januari 2019

BUPATI

SYARIF MBUINGA

PEMERINTAH KABUPATEN POHUVATO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	989.132.017.642,40	955.946.119.926,20	96,64	970.534.277.246,48
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	74.201.375.007,00	50.953.585.078,20	68,67	62.337.943.760,48
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.143.760.798,00	8.244.259.730,00	73,98	9.618.779.242,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.467.727.000,00	3.974.757.033,00	53,23	5.593.069.349,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.800.000.000,00	2.200.994.050,00	57,92	3.685.307.703,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	51.789.887.209,00	36.533.574.265,20	70,51	43.410.787.466,48
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	880.341.494.400,00	873.954.766.371,00	99,27	880.890.770.953,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	730.575.882.000,00	723.282.363.424,00	99,00	740.354.936.381,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.679.939.000,00	6.947.340.461,00	90,46	6.817.818.500,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.993.790.000,00	1.190.623.339,00	59,72	1.376.932.105,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	489.117.966.000,00	487.482.122.000,00	99,67	529.422.948.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	62.626.752.000,00	61.117.763.921,00	97,59	80.297.640.386,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan - LRA	61.985.105.000,00	61.131.125.860,00	98,62	23.978.463.479,00
4.2.1.6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LRA	44.875.813.000,00	43.788.688.607,00	97,58	38.588.134.213,00
4.2.1.7	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisk - LRA	62.296.517.000,00	61.624.689.236,00	98,92	59.872.989.698,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	120.319.701.000,00	120.170.204.412,00	99,88	120.987.917.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	120.319.701.000,00	120.170.204.412,00	99,88	120.987.917.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	25.000.000.000,00	27.433.742.935,00	109,73	19.547.917.572,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	25.000.000.000,00	27.433.742.935,00	109,73	19.547.917.572,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	4.445.911.400,00	3.068.455.600,00	69,02	0,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	4.445.911.400,00	3.068.455.600,00	69,02	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	34.589.148.235,40	31.037.768.477,00	89,73	27.305.562.533,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	34.589.148.235,40	31.037.768.477,00	89,73	27.305.562.533,00
5	BELANJA	855.941.060.021,35	812.324.184.587,00	94,90	827.465.026.349,56
5.1	BELANJA OPERASI	653.015.295.841,09	621.462.362.893,00	95,20	638.160.941.589,19
5.1.1	Belanja Pegawai	326.837.467.138,80	321.350.499.179,00	98,32	331.052.664.590,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	265.855.312.258,29	242.397.423.470,00	91,25	279.675.756.999,19
5.1.5	Belanja Hibah	48.471.545.244,00	47.405.095.244,00	97,80	20.222.970.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.050.971.200,00	10.509.350.000,00	87,21	7.208.550.000,00
5.2	BELANJA MODAL	186.159.904.880,26	174.904.529.862,00	93,95	188.879.484.760,37
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.583.000.000,00	2.565.000.000,00	99,30	1.603.690.719,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.768.931.900,00	66.403.449.862,00	93,83	52.702.519.930,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.320.723.327,00	75.898.063.543,00	94,24	60.536.085.286,69
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Jaringan	29.573.994.605,26	27.628.988.327,00	93,42	67.994.886.786,69
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.913.255.047,40	2.609.028.130,00	89,56	6.042.302.038,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	16.765.859.300,00	15.757.286.832,00	93,98	424.600.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	16.765.859.300,00	15.757.286.832,00	93,98	424.600.000,00
6	TRANSFER	145.968.187.380,00	144.555.189.232,00	99,03	153.435.034.516,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.861.148.780,00	930.574.460,00	50,00	2.012.009.403,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.114.376.080,00	557.188.054,00	50,00	1.097.749.083,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	746.772.700,00	373.386.406,00	50,00	914.260.320,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	144.107.038.600,00	143.624.614.772,00	99,67	151.423.025.113,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	144.107.038.600,00	143.624.614.772,00	99,67	150.647.140.742,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	775.894.371,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.777.229.758,95)	(933.253.892,80)	7,30	(10.385.783.619,08)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	100,00	30.143.013.378,03
7.1.1	Penggunaan SILPA	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	100,00	30.143.013.378,03
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
7.2.2	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	100,00	23.143.013.378,03
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	11.813.975.866,15	0,00	12.777.229.758,95

Marisa, 1 Januari 2020

BUPATI

SYARIF MBUINGA

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI_E1118089_SITI%20WINDA%20 PURNAMA%20LAIMA_PENGUKURAN%2 OKINERJA%20KEUANGAN%20PEMDA%2 OKABUPATEN%	Siti winda purnama laima Laima

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
12254 Words	83080 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
76 Pages	225.4KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
May 14, 2022 12:59 PM GMT+8	May 14, 2022 1:04 PM GMT+8

● 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less then 25 words)



SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 021/SRP/FE-UNISAN/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Siti Winda P. Laima
NIM : E1118089
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 21 Mei 2022
Tim Verifikasi,

Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama	:	Siti Winda Purnama Laima
Nim	:	E1118089
Tempat/Tgl Lahir	:	Popayato, 18 Mei 2000
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2018
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Molosipat, Kec. Popayato Barat, Kab. Pohuwato. Provinsi Gorontalo.

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan belajar di SD Negeri 01 Molosipat, Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Pada Tahun 2012
2. Kemudian Melanjutkan ke jenjang berikutnya di MTS Negeri Kota Gorontalo, Kec. Sipatana, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan selesai pada tahun 2015
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo pada tahun 2018
4. Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi.

